ANALISIS AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA NAFKAH IDDAH DAN NAFKAH ANAK DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H.)

OLEH :

NAMA : IKE ARUM SARI
NPM : 191021050
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

TESIS

ANALISIS AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA NAFKAH IDDAH DAN NAFKAH ANAK DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

NAMA :IKE ARUM SARI
NOMOR MAHASISWA : 191021050
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

Telahdipertahankan di depan Tim Penguji
Padatanggal30 Juli 2021
Dan dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Ketua	Sekretaris
Dr. Zulkarnain Umar, S.H., M.IS	**Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si**
Anggota	**Anggota**
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H	**Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H**

Mengetahui:
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

TESIS

ANALISIS AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA NAFKAH IDDAH DAN NAFKAH ANAK DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

NAMA	:	**IKE ARUM SARI**
NPM	:	**191021050**
BIDANG KAJIAN UTAMA	:	**HUKUM BISNIS**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I **Tanggal** 05 / 07 / 2021

Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., MIS

Pembimbing II **Tanggal** 08 / 06 / 2021

Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si

Mengetahui :

Ketua Program Studi

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah Dilaksanakan Bimbingan Tesis Terhadap :

Nama : Ike Arum Sari

NPM : 191021050

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Tesis : Analisis Akibat Hukum Perceraian Terhadap Penyelesaian Sengketa Nafkah Iddah Dan Nafkah Anak Di Pengadilan Agama Pekanbaru

Pembimbing I : Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., MIS

Pembimbing II : Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF	
		Pembimbing 2	
07-04-2021	Perbaiki dan sempurnakan: a. Buat tabel persamaan dan perbedaan penelitian relevan dengan penelitian terdahulu b. Metode penelitian pada sub bab jenis penelitian dipertegas dan diperjelas c. Penelitian empiris atau penelitan normatif atau mixed d. Baca buku penelitian hukum Prof. Irwansyah		
04-05-2021	Perbaiki dan sempurnakan: a. Lengkapi dokumentasi wawancara, foto b. Lengkapi daftar isi, kata pengantar c. Lengkapi abstrak		
20-05-2021	Perbaiki dan sempurnakan: a. Korelasikan judul dengan hukum bisnis b. Alasan pengambilan sampel harus ilmiah (akademik)		

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

28-05-2021	Perbaiki dan sempurnakan: a. Apakah dengan teknik wawancara dapat menjawab semua pertanyaan yang dirumusan masalah b. Struktur organisasi diperbaiki c. Hasil wawancara dari responden yang didapat dari kutipan langsung dianalisis		
07-06-2021	Perbaiki dan sempurnakan: a. Konkritkan mengenai teori yang digunakan b. Perbaiki hasil penelitian kembali		
08-06-2021	Acc dapat dilanjutkan ke Pembimbing I		
			Pembimbing I
09-06-2021	Perbaiki dan sempurnakan: a. Tidak perlu mengulang kembali teori dipembahasan b. Pembuatan tabel dalam populasi dan sampel diperbaiki c. Tambahkan analisa pada bagian pembahasan		
14-06-2021	Perbaiki dan sempurnakan: a. Tambahkan referensi buku tentang perceraian b. Perbaiki kembali abstrak c. Bahasa asing gunakan font italic/ miring		
18-06-2021	Perbaiki dan sempurnakan: a. Penambahan teori pada bab 2 b. Tambahkan abstrak dalam bahasa inggris c. Masukan jurnal pembimbing yang berkaitan dengan judul peneliti		

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

21-06-2021	Perbaiki dan sempurnakan: a. Perbaiki pada setiap penulisan b. Perjelas apa yang menjadi permasalahan c. Perbaiki susunan penulisan daftar pustaka		
28-06-2021	Perbaiki dan sempurnakan: a. Perbaiki footnote pada bagian hasil wawancara b. Kesimpulan dan saran c. Buatlah berita acara bimbingan		
05-07-2021	Acc Pembimbing I dan dapat dilanjutkan Ujian Tesis		

Pekanbaru, 09 Juli 2021
Mengetahui :

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum
Direktur Program Pasca Sarjana
Universitas Islam Riau

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT
Nomor: 131/A-UIR/5-PPs/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama	: **IKE ARUM SARI**
NPM	: **191021050**
Program Studi	: **Ilmu Hukum (Hukum Bisnis)**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 09 Juli 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 09 Juli 2021
Staf Pemeriksa

Indrian Syafitri, S.AP., M.Si.

Lampiran :
- Turnitin Originality Report
- Arsip *Syafitri_ind05*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

turnitin **Turnitin Originality Report**

ANALISIS AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA NAFKAH IDDAH DAN NAFKAH ANAK DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU by Ike Arum Sari Ike Arum Sari

From Prodi. Ilmu Hukum (TESIS PASCASARJANA UIR)

Similarity Index	Similarity by Source	
20%	Internet Sources:	20%
	Publications:	8%
	Student Papers:	4%

Processed on 09-Jul-2021 11:37 WIB
ID: 1617404463
Word Count: 23895

sources:

1 2% match (Internet from 08-Jun-2020)
http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/4705/1/skripsi.pdf

2 2% match (Internet from 18-Apr-2021)
https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/tadabbur/article/download/58/26

3 2% match (Internet from 15-Apr-2019)
http://digilib.uin-suka.ac.id/34577/1/14350055_BAB%20I_BAB_TERAKHIR_DAFTAR_PUSTAKA.PDF

4 1% match (Internet from 03-Aug-2018)
https://media.neliti.com/media/publications/240260-maslahah-dalam-perspektif-hukiim-islam-d0758bcd.pdf

5 1% match (Internet from 27-Nov-2020)
http://repository.uin-suska.ac.id/22432/2/GABUNGAN%20KECUALI%20BAB%20IV.pdf

6 1% match (Internet from 27-Nov-2020)
http://repository.uin-suska.ac.id/26097/2/TANPA%20BAB%20IV.pdf

7 1% match (Internet from 27-Feb-2021)
https://www.intelextual.com/2020/10/pengertian-dan-macam-macam-maslahat.html

8 1% match (Internet from 10-Feb-2020)
http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/42860/Chapter%20II.pdf;sequence=3

9 1% match (Internet from 04-Oct-2014)
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25440/4/Chapter%20II.pdf

10 1% match (Internet from 09-Mar-2021)
https://journal.walisongo.ac.id/index.php/JISH/article/download/6960/pdf

11 1% match (Internet from 09-Dec-2018)
http://eprints.walisongo.ac.id/3729/3/102111072_Bab2.pdf

12 1% match (Internet from 09-Oct-2020)
https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/download/5146/pdf

13 1% match (Internet from 31-Mar-2021)
http://scholar.unand.ac.id/55391/18/TESIS%20FULL%20....pdf

14 1% match (Internet from 26-Nov-2013)
http://eprints.undip.ac.id/16439/1/Ani_Sri_Duriyati.pdf

15 1% match (Internet from 28-Jun-2021)
http://repository.uir.ac.id/1936/1/161022050.pdf

16 1% match (Internet from 26-May-2014)
http://pa-pekanbaru.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=7

17 1% match ()
Hutari, Trinurcahyani, "HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN (Studi kasus di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga)", 2021

18 1% match (Internet from 11-Nov-2020)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 035/KPTS/PPs-UIR/2021
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS - UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
2. Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau
9. SuratPermohonan Perubahan Judul **Sdr/i Ike Arum Sari** tanggal 19 Januari 2021

M E M U T U S K A N

1. Menunjuk :

No	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1	Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.IS	Lektor	Pembimbing I
2	Dr. Anton Afrizal Candra, S. Ag. M.Si	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **IKE ARUM SARI**
N P M : **191021050**
Program Studi : **Ilmu Hukum/Hukum Bisnis**
Judul Tesis : **"ANALISIS AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA NAFKAH IDDAH DAN NAFKAH ANAK DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU".**

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Dengan diterbitnya Surat Keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi.
6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 23 Januari 2021
Direktur,

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.
NIP. 195408081987011002

aikan Kepada :
as Islam Riau di Pekanbaru
Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi PPS UIR di Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Ike Arum Sari
NPM	:	191021050
Tempat/Tanggal Lahir	:	Purworejo / 21 Agustus 1997
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Alamat	:	Jl. Fasilitas, Dusun Titian Gading, Desa Sontang, Kec. Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu.
Judul Tesis	:	Analisis Akibat Hukum Perceraian Terhadap Penyelesaian Sengketa Nafkah Iddah Dan Nafkah Anak Di Pengadilan Agama Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Tesis ini belum pernah ditulis orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Tesis/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 09 Juli 2021

Yang menyatakan,



Ike Arum Sari

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

Perceraian yang terjadi diantara suami terhadap istrinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana ketentuan pasal ini menentukan kewajiban dari mantan suami yang berupa mut'ah, nafkah iddah (bila istrinya tidak nusyus) dan nafkah untuk anak-anak. Dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari istri majelis hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan istri berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak. Namun kenyataannya setelah istri dicerai, pemenuhan nafkah tersebut ada yang belum terpenuhi sesuai dengan keputusan Majelis Hakim.

Masalah penelitian ini adalah Bagaimanakah Akibat Hukum Perceraian Terhadap Penyelesaian Sengketa Nafkah Iddah Dan Nafkah Anak Di Pengadilan Agama Pekanbaru, dan Apa Yang Menjadi Kendala Bagi Mantan Suami Untuk Menjalankan Kewajibannya Dalam Pemberian Nafkah Iddah dan Anak Setelah Putusnya Perkawinan Karena Perceraian.

Metode penelitian ini termasuk kedalam penelitian *Socio legal Research* yakni penelitian sosial tentang hukum, dimana suatu penelitian yang bersifat hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Penelitian ini menitikberatkan kepada suatu proses bekerjanya atau pengaruh hukum dalam kehidupan sosial, sedangkan sifatnya adalah deskriptif.

Hasil penelitian dan pembahasan diketahui Akibat Hukum Perceraian Terhadap Penyelesaian Sengketa Nafkah Iddah Dan Nafkah Anak Di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah mantan suami memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan istri selama dalam masa menunggu, yang mana dalam masa menunggu tersebut istri tidak boleh menikah, dan sebagai ayah maka memiliki kewajiban kepada anaknya untuk memberikan pembiayaan pemeliharaan dan pendidikan anak hingga dewasa hingga mampu mempertanggungjawabkan hidupnya sendiri. Bila ayah tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk membiayai pemeliharaan anak, maka seorang (mantan) istri dapat melakukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama. Namun sebagaimana yang terjadi banyak mantan suami (ayah) tidak memenuhi kewajibannya, tetapi dikarenakan keterbatasan biaya eksekusi menyebabkan tidak ada satupun mantan istri (ibu) yang mengajukan permohonan eksekusi, dan Kendala Bagi Mantan Suami Untuk Menjalankan Kewajibannya Dalam Pemberian Nafkah Iddah dan Anak Setelah Putusnya Perkawinan Karena Perceraian adalah kurang kesadaran serta kurangnya pemahaman akan dalam memberikan nafkah iddah dan anak, tidak mempunyai pekerjaan tetap dimana mantan suami kebanyakan berpenghasilan kecil, mantan suami menikah kembali, hal ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap keadaan finansialnya dimana ia harus membiayai keluarganya yang baru, dan adanya anggapan biaya nafkah yang akan diberikan tidak lain akan dipergunakan dan dimanfaatkan oleh mantan istrinya, serta adanya anggapan mantan istri mempunyai penghasilan sediri.

Kata Kunci: ***Akibat Hukum, Perceraian, Nafkah Iddah Dan Nafkah Anak***

ABSTRACT

Divorce that occurs between husband and wife, is in accordance with the provisions of Article 41 (c) of Law Number 1 Year 1974, where the provisions of this article determine the obligations of the ex-husband in the form of mut'ah, iddah livelihood (if the wife is not nusyus) and a living. for children. In this case, although there is no demand from the wife, the panel of judges can punish the ex-husband to pay the ex-wife in the form of mut'ah, iddah and child support. However, the reality is that after the wife is divorced, the fulfillment of this income has not been fulfilled in accordance with the decision of the Panel of Judges.

The problem of this research is what are the consequences of divorce law on the settlement of disputes over the livelihood of Iddah and the livelihood of children at the Pekanbaru Religious Court, and what are the obstacles for the ex-husband to carry out his obligations in providing Iddah and child livelihoods after the marriage is broken due to divorce

The research method is included socio Legal research, namely social research on law, where a research that only places the law as a social phenomenon. This research focises on a working process or the influence of law in social life, while it is descriptive in nature.

The results of the research and discussion show that the legal consequences of divorce on the settlement of livelihood issues and children's livelihoods at the Pekanbaru Religious Court are that the ex-husband has an obligation to meet the needs of his wife during the waiting period, in which the wife cannot marry, and as a father, the wife is not allowed to marry. the obligation to their children to provide financing for the maintenance and education of the children until they reach adulthood so that they are able to be accountable for their own lives. If the father does not carry out the court decision to pay for the maintenance of the child, then a (ex) wife can file a request for execution to the Head of the Religious Court. However, as happened, many ex-husbands (fathers) did not fulfill their obligations, but due to limited execution costs, none of the ex-wives (mothers) applied for execution, and obstacles for the ex-husband to carry out their obligations in providing Iddah and child livelihoods after the marriage was broken. Because divorce is a lack of awareness and lack of understanding in providing iddah and child livelihoods, does not have a permanent job where most ex-husbands earn little, ex-husbands remarry, this will certainly greatly affect his financial situation where he has to support his new family, and There is an assumption that the living costs to be given will be used and utilized by his ex-wife, and there is an assumption that the ex-wife has an income of her own.

Keywords: *Legal Consequences, Divorce, Iddah Livelihood and Child's Livelihood*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Dengan segala kerendahan hati dan penuh ucapan Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "**Analisis Akibat Hukum Perceraian Terhadap Penyelesaian Sengketa Nafkah Iddah Dan Nafkah Anak Di Pengadilan Agama Pekanbaru**".

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, atas segala bantuan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis selama pembuatan karya tulis ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum., sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Riau. Atas segala kemudahan dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama menimba ilmu di Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., selaku Kepala Prodi Magister Hukum, yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., MIS, Pembimbing I dalam penulisan tesis ini, yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan kepada penulis hingga selesainya tesis ini

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5. Bapak Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si., selaku Pembimbing II dalam penulisan tesis ini, yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan kepada penulis hingga selesainya tesis ini
6. Kepada kedua orang tua penulis yaitu ayahanda Sumardi dan Ibunda Jumiati dan adinda Mila Amanah Sari yang telah banyak memberikan bantuan baik moril dan materil kepada penulis hingga tesis ini selesai.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.
8. Terimakasih penulis ucapkan kepada seseorang yang selalu memberikan support dan semangat dalam penyelesaian tesis ini, Agus Setiadi.
9. Terimakasih kepada Dian Lusiana Dewi, Desi Purwanti, Astuti Evayanti, Aulia Sari yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
10. Kepada rekan-rekan perkuliahan Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Islam Riau yang telah berjuang bersama penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan sekali kritik dan saran, yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Selanjutnya semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan kaedah bagi kita semua. Aamiin

Pekanbaru, Juli 2021
Penulis

Ike Arum Sari

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN BAHWA TESIS TIDAK PLAGIAT ii

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS..... iii

TANDA PERSETUJUAN TESIS vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Masalah Pokok..... 8

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8

D. Kerangka Teori..... 9

E. Konsep Operasional 31

F. Metode Penelitian..... 33

BAB II : TINJAUAN UMUM

A. Profil Pengadilan Agama Pekanbaru..... 38

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan..... 45

C. Tinjauan Umum Tentang Perceraian..... 58

D. Tinjauan Umum Tentang Nafkah Iddah dan Anak 73

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Penyelesaian Sengketa Nafkah Iddah Dan Nafkah Anak Di Pengadilan Agama Pekanbaru 79

B. Kendala Bagi Mantan Suami Untuk Menjalankan Kewajibannya Dalam Pemberian Nafkah Iddah dan Nafkah Anak Setelah Putusnya Perkawinan Karena Perceraian 103

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan 117

B. Saran 119

DAFTAR KEPUSTAKAAN 120

Lampiran 125

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya perkawinan memiliki peranan yang sangat penting dalam realita kehidupan manusia, dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami-istri), mereka saling berhubungan agar mendapatkan keturunan sebagai penerus generasi, insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah disebut "keluarga".[1]

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, bahwa perkawinan yang sah itu dilakukan menurut agama dan kepercayaannya dari para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Selain itu juga harus dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, sesuai dengan Pasal tersebut diatas, maka pelaksanaan menurut agama dan kepercayaan masing-masing merupakan syarat mutlak untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan.

Pencatatan perkawinan, dimaksudkan agar perkawinan menjadi jelas adanya bagi para pihak yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat pada umumnya. Pencatatan bertujuan menjamin ketertiban dan kepastian hukum serta merupakan pembuktian dalam bidang perkawinan.

[1] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Group, Jakarta, 2008, hlm. 1.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perkawinan pada dasarnya memiliki tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun bilamana tujuan yang dimaksud tersebut tidak dapat tercapai oleh karena suatu hambatan-hambatan kecil dalam membina rumah tangga, maka akan mengakibatkan perkawinan itu putus.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama serta asas personalitas keislaman menjadi dasar kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara:

1. Perkawinan.
2. Kewarisan.
3. Wasiat.
4. Hibah.
5. Wakaf.
6. Zakat.
7. Infaq.
8. Shadaqah.
9. Ekonomi syari'ah.[2]

Hukum positif yang mengatur Perceraian di indonesia yaitu, berdasarkan ketentuan Pasal 38, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 113 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

[2] Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pengadilan Agama

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

(KHI), menentukan bahwa perkawinan dapat putus karena, kematian, perceraian, dan Atas keputusan pengadilan (apabila tidak dipenuhi syarat-syarat materil perkawinan). Dengan demikian diketahui juga bahwa putusnya perkawinan karena perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.[3]

Untuk dapat melakukan perceraian, harus cukup alasan bahwa suami isteri tidak lagi dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Hal ini ditegaskan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan serta Pasal 7 ayat (1) Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dimana izin untuk bercerai dapat diberikan pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar oleh suami atau istri untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan yaitu:

1. "Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.

[3] Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga,* Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm. 125.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri, ataukah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga".

Secara umum alasan perceraian dalam masyarakat adalah sudah tidak ada lagi kecocokan di antara suami dan istri yang disebabkan oleh berbagai hal. Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan membawa pula akibat-akibat hukum tertentu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau Permohonan perceraian yang dilakukan oleh istri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim di depan sidang Pengadilan Agama (Pasal 115 KHI).

Untuk dapat diketahui bahwasanya jumlah perkara yang masuk keseluruhan di Pengadilan Agama Pekanbaru pada tahun 2019 yaitu sebanyak 2153 perkara, dimana perkara mengenai nafkah iddah dan nafkah anak bisa dilihat dari perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat. Berikut dapat dilihat penjelasan dalam penyelesaian perkaranya tahun 2018-2019 yakni:

Tabel I. 1
Penyelesaian Perkara Nafkah Iddah Dan Nafkah Anak Di Pengadilan Agama Pekanbaru

Jenis	Keterangan Penyelesaian Perkara							
	Perkara masuk	Dicabut	Tidak diterima	Digugurkan	Ditolak	Dicoret	Dikabulkan	Belum Selesai
Cerai Talak	534	47	1	5	5	22	388	66
Cerai gugat	1619	148	3	15	15	48	1253	140
	2153	195	4	20	20	70	1641	206

Sumber Data: Bagian Hukum, 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Untuk dapat diketahui bahwasanya jumlah perkara yang masuk keseluruhan mengenai nafkah iddah dan nafkah anak yang diketahui dari perkara perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu sebanyak 2153 perkara. Faktor Penghambat tidak dilaksanakan pembayaran nafkah anak yaitu pekerjaan suami yang tidak tetap dan apabila suami yang telah mengabaikan nafkah kebutuhan terhadap istri dan anaknya seperti uang belanja kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan tempat tinggal istri tersebut tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan, yaitu dengan suka rela adalah pihak yang dikalahkan melaksanakan sendiri putusan pengadilan tanpa ada paksaan dari pihak lain. Pasal 196 HIR dan 264Rbg melaksanakan putusan tersebut dan dengan cara paksa proses eksekusi adalah putusan yang mana pihak yang menang dengan meminta bantuan alat Negara atau Pengadilan untuk melaksanakan putusan apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan secara sukarela.

Perceraian yang terjadi karena adanya talak dari suami terhadap istrinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya. Pasal ini menentukan kewajiban dari mantan suami yang berupa *mut'ah, nafkah iddah* (bila istrinya tidak nusyus) dan nafkah untuk anak-anak. Dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari istri majelis hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan istri berupa *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah anak.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Nafkah sendiri berarti belanja hidup (uang) pendapatan, suami wajib memberi kepada Istrinya, rizki, bekal hidup sehari-hari dan kata *iddah* berarti masa tunggu bagi wanita yang dicerai oleh mantan suaminya, jadi nafkah Iddah sama juga berarti nafkah yang diberikan oleh mantan suami setelah terjadinya perceraian. Sehingga yang dimaksud dengan nafkah Iddah atau nafkah cerai adalah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada mantan istrinya berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka. [4]

Sedangkan *Mut'ah* juga berarti sesuatu yang dengannya dapat diperoleh suatu (beberapa) manfa'at atau kesenangan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberian *Mut'ah* seorang suami terhadap Isteri yang telah diceraikannya adalah dengan adanya pemberian tersebut diharapkan dapat menghibur atau menyenangkan hati isteri yang telah diceraikan dan dapat menjadi bekal hidup bagi mantan Isteri tersebut, dan juga untuk membersihkan hati kaum wanita dan menghilangkan kehawatiran terhadap penghinaan kaum pria terhadapnya.[5] Ketentuan *mut'ah* tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 dan 158, sebagai berikut:

- Pasal 149, menyebutkan bahwa:

  "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

  a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali istrinya tersebut *qabla al-duklul*.

[4] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 196, hlm. 667.
[5] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Prenanda Media, Jakarta Timur, 2003, hlm. 92-93.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

❒ Pasal 158 KHI, menyebutkan bahwa:

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

"perceraian itu atas kehendak suami".

Merujuk pada ketentuan yang telah disebutkan diatas, secara yuridis normatif, ketentuan tersebut menjadi acuan bagi majelis hakim dalam menjatuhkan pembebanan berupa nafkah selama masa iddah dan mut'ah sesuai dengan hasil pemeriksaan secara cermat dipersidangan.

Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-sebaiknya.
2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Berdasarkan pembahasan tersebut maka perceraian yang terjadi diantara suami terhadap istrinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana ketentuan pasal ini menentukan kewajiban dari mantan suami yang berupa mut'ah, nafkah iddah (bila istrinya tidak nusyus)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dan nafkah untuk anak-anak. Dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari istri majelis hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan istri berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak. Namun kenyataannya setelah istri dicerai, pemenuhan nafkah tersebut ada yang belum terpenuhi sesuai dengan keputusan Majelis Hakim.

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang masalah **"Analisis Akibat Hukum Perceraian Terhadap Penyelesaian Sengketa Nafkah Iddah Dan Nafkah Anak Di Pengadilan Agama Pekanbaru".**

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah pokok yang diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Akibat Hukum Perceraian Terhadap Penyelesaian Sengketa Nafkah Iddah Dan Nafkah Anak Di Pengadilan Agama Pekanbaru?
2. Apa Yang Menjadi Kendala Bagi Mantan Suami Untuk Menjalankan Kewajibannya Dalam Pemberian Nafkah Iddah dan Anak Setelah Putusnya Perkawinan Karena Perceraian?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan kompleksitas permasalahan dalam, maka penulis

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menetapkan suatu tujuan penelitian yaitu:

a. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Perceraian Terhadap Penyelesaian Sengketa Nafkah Iddah Dan Nafkah Anak Di Pengadilan Agama Pekanbaru.
b. Untuk Mengetahui Kendala Bagi Mantan Suami Untuk Menjalankan Kewajibannya Dalam Pemberian Nafkah Iddah dan Anak Setelah Putusnya Perkawinan Karena Perceraian.

2. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat baik pada tataran theoritis akademis maupun pada hal praktis selain itu kita bisa melihat manfaatnya antara lain.

a. Manfaat Teoritis Akademis.

   Manfaat secara teoritis akademis diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian mengenai penyelesaian sengketa nafkah iddah dan nafkah anak pada Pengadilan Agama Pekanbaru.

b. Manfaat Praktis.

   Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi Penulis.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tentang *al-Maslahah*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Maslahah, secara etimologi adalah kata tunggal dari *al-masalih,* yang searti dengan kata *salah,* yaitu "mendatangkan kebaikan Terkadang digunakan juga istilah lain yaitu *al-islislah* yang berarti "mencari kebaikan" tidak jarang kata *maslahah* atau *istislah* ini disertai dengan kata *al-munasib* yang berarti "hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya.[6] Dari beberapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu, apa saja, yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudaratan, maka semua itu disebut dengan *maslahah.*

Dalam konteks kajian ilmu ushul al-fiqh, kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis, yang berarti " berbagai manfaat yang dimaksudkan *Syari'* dalam penetapan hukum bagi hamba-hambanya, yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut.[7] *Maslahah* merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum *(istinbat)* yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadis Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung.

Maslahah mursalah biasa ditemukan dengan melalui metode *islislah*, dan ini merupakan dasar (sumber) hukum Islam Menurut istilah para fuqaha, *islislah* adalah hukum (yang ditetapkan) karena tuntutan *maslahat* yang tidak didukung maupun diabaikan oleh dalil khusus, tetapi sesuai dengan *maqashid*

[6] H.M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer,*Gaung Persada Press, Jakarta, 2007, hlm.112.
[7] *Ibid.*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

al-Syari'ah al-Ammali (tujuan umum hukum Islam). Istislah merupakan jalan yang ditempuh hukum Islam untuk menerapkan kaidah-kaidah dan perintah-perintahnya terhadap berbagai peristiwa baru yang tidak ada nashnya. juga menjadi jalan dalam menetapkan aturan yang harus ada dalam kehidupan umat manusia, agar sesuai dengan *maqashid al-Syari 'ah al-Ammah*, dalam rangka menarik kemaslahatan, menolak kemafsadatan dan menegakkan kehidupan sempurna mungkin. *Maslahah mursalah* adalah pengertian maslahat secara umum, yaitu yang dapat menarik manfaat dan menolak mudarat, serta yang direalisasikan oleh syari at Islam dalam bentuk umum. *Nash-nash* pokok ajaran Islam telah menetapkan kewajiban memelihara kemaslahatan dan memperhatikannya ketika mengatur berbagai aspek kehidupan. Pembuat syara' (Allah swt dan Rasul-Nya) tidak menentukan bentuk-bentuk dan macam-macam maslahat, sehingga maslahat seperti ini disebut dengan mursalah, yaitu mutlak tidak terbatas.

Telah dijelaskan di atas, bahwa Syari'at Islam berorientasi pada kemanfaatan dan menitikberatkan keserasian hukum untuk memajukan kemaslahatan Premis dasarnya adalah bahwa hukum harus melayani kepentingan masyarakat. Kemaslahatan atau kepentingan itu dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori, yaitu :

1. Maslahah berdasarkan segi perubahan maslahat

   Menurut Mustafa asy-Syalabi terdapat dua bentuk maslahat berdasarkan segi perubahan maslahat Pertama, *al-maslahah as-sabitah.*yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

akhir zaman Misalnya, berbagai kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Kedua, *al-maslahah al-mutagayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lainnya Perlunya pembagian ini, menurut Mustafa asy-Syalabi dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan yang bisa berubah dan yang tidak berubah.[8]

2. Maslahah berdasarkan keberadaan maslahat menurut syara'

   Maslahat semacam ini menurut Mustafa asy-Syalabi membaginya kepada tiga macam yaitu :

   a. *Al-maslahah al-mu tabarah*

      Al-maslahah al-mu tabarah adalah kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh syara'. Baik jenis maupun bentuknya Artinya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut Misalnya tentang hukuman atas orang yang meminum-minuman keras.

   b. *Al-maslahah al-mulgah*

      Al-maslahah al-mulgah adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara' Misalnya, syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual

[8] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*,Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1999, hlm. 1145.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

di siang hari dalam bulan Ramadhan dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan bagi 60 orang fakir miskin.[9]

c. *Al-maslahah al-mursalah.*

Al-maslahah al-mursalah adalah kemaslahatan yang didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis), bukan oleh nash yang rinci Kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan (ditolak) syara' melalui dalil yang rinci Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua . yaitu kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum, dan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara' secara rinci, tetapi didukung oleh makna sejumlah nash Kemaslahatan yang pertama disebut sebagai almaslahah al-garibah (kemaslahatan yang asing), namun para ulama tidak dapat mengemukakan contohnya secara pasti Bahkan Imam asy-Syatibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori Sedangkan kemaslahatan dalam bentuk kedua disebut al-maslahah al-mursalah Kemaslahatan ini didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis), bukan oleh nash yang rinci.[10]

3. Maslahah berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan

Para ahli ushul fikih mengemukakan beberapa pembagian maslahat

[9] *Ibid.,* h.1146
[10] *Ibid.*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, mereka membaginya dalam tiga bentuk sebagai berikut:[11]

a. *Al-Maslahah ai-Dharuriyyah*

Al-Maslahah al-Dharuriyyah yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat Dengan kata lain *Al-Maslahah al-Dharuriyyah* (kebutuhan primer) adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta Menurut para ahli usul fikih, kelima kemaslahatan ini disebut *al-masalih alkhamsah.* Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan bisa hancur karenanya, dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat Menurut al-Syathibiy, dari kelima hal ini adalah agama dan dunia dapat berjalan seimbang dan apabila dipelihara akan dapat member kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi.

b. *Al-Maslahah al-Hajiyyah*

Al-Maslahah al-Hajiyyah yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia Dengan kata lain, kebutuhan al- Hajiyyah (kebutuhan sekunder), adalah suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat dharury Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupanitu sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya.

c. *AI-Maslahah al- Tahsiniyyah*

Al-Maslahah al-Tahsiniyyah yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasan yang dapat melengkapi keemaslahatan sebelumnya Dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia Jika kemaslahatan *Tahsiniyyah* ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup.
Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan

[11] *Ibid.*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tata tertib pergaulan.[12]

2. Teori Tentang *Iddah*

Menurut bahasa kata iddah berasal dari kata kerja *"adda-ya'uddu"* yang artinya menghitung. Jadi kata iddah artinya hitungan, perhitungan, sesuatu yang harus diperhitungkan. Menurut ash-Shon'ani iddah adalah suatu nama bagi suatu masa tunggu yang wajib dilakukan oleh wanita untuk tidak melakukan perkawinan setelah kematian suaminya atau perceraian dengan suaminya itu, baik dengan melahirkan anaknya, atau beberapa kali suci atau haidh, atau beberapa bulan tertentu.[13]

Macam-macam *Iddah,* antara lain:

1. Iddah talak. Iddah talak artinya iddah yang terjadi karena perceraian
2. Iddah hamil. Iddah hamil yaitu iddah yang terjadi apabila perempuan yang diceraikan itu sedang hamil. Iddah mereka adalah sampai melahirkan anak.
3. Iddah wafat. Iddah wafat yaitu iddah yang terjadi apabila seorang perempuan ditinggal mati suaminya. Iddahnya empat bulan sepuluh hari.
4. Iddah wanita yang kehilangan suami. Bila ada perempuan yang kehilangan suami, dan tidak diketahui dimana suaminya itu berada, apakah ia telah mati atau masih hidup, maka wajiblah ia menunggu empat tahun lamanya.

[12] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,* Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999, hlm. 213
[13] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munkahat,* CV Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm. 122

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Teori *Hadhonah*

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sangat terpaksa. Perceraian hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sangat terpaksa. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundangan.[14] Perceraian menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah putusnya perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.[15]

Putusnya hubungan pernikahan pada dasarnya diakibatkan oleh adanya perceraian, baik cerai kerena kematian maupun karena cerai hidup melalui 2 cara yaitu:

1. "Cerai Talak, yaitu cerai khusus bagi yang beragama islam, dimana suami (pemohon) mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada istri. Berdasarkan agama islam, cerai dapat dilakukan oleh

[14] Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 351.
[15] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 18.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

suami dengan mengikrarkan talak kepada istri, namun agar sah secara hukum suami mengajukan permohonan menjatuhkan ikrar talak terhadap termohon di hadapan Pengadilan Agama

2. Cerai Gugat, yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh istri (Penggugat) terhadap suami (tergugat) kepada Pengadilan Agama dan berlaku pula pengajuan gugatan terahdap suami oleh istri yang beragama islam di Pengadilan Negeri. Cerai gugat inilah yang mendominasi jenis perceraian"[16].

Suami isteri harus bisa memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya untuk membangun keluarga agar tetap harmonis. Kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal balik yang berarti bahwa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak isteri dan yang menjadi kewajiban isteri menjadi hak suami. Suami isteri harus bertanggung jawab untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya untuk membangun keluarga yang harmonis dan tenteram. Pada umumnya hak-hak dasar dan kewajiban suami isteri itu dibagi menjadi empat macam di antaranya:

1. Nafkah
2. *Hadanah*
3. Menyusukan anak
4. Pergaulan suami istri.[17]

[16] Adib Bahari, *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono Gini dan Hak Asuh Anak*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016, hlm.7.
[17] Muchtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan,* Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hlm. 193.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selain itu, menurut Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan bahwa:

"Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayang menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya samapi anak tersebut dapat mengurus dirinya sendiri yaitu berumur 21 tahun".

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Manusia perlu untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Karena anak sebagai generasi penerus dari orang tuanya, juga sebagai generasi penerus bangsa dan negara. Anak sebagai generasi penerus tentu saja sangat diharapkan sekali keberadaannya dalam keluarga, sehingga perlu dijaga, dibina dan dilindungi, agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Hadhanah merupakan pemeliharaan anak didalam islam. Secara etimologis, hadhanah ini berarti disamping atau berada dibawah ketiak. Sedangkan secara terminologisnya, hadhanah merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kuang mampu kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri.[18] Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya. Apabila dua orang suami bercerai sedangkan keduanya mempunyai seorang anak yang belum *mumayyiz* (belum mengerti

[18] Abdul Aziz Dahlan, *Eksiklopedi Hukum Islam*, Ikhtiar bari van hoepe, Jakarta, 1999, hlm. 415.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kemaslahatan dirinya), maka istrilah yang berkewajiban untuk mendidik dan merawat anak itu hingga ia mengerti akan kemaslahatan dirinya.[19]

Hadanah berbeda maksudnya dengan pendidikan (tarbiyah). Dalam pengertian *hadanah* terkandung makna pemeliharaan jasmani dan rokhani, di samping itu terkandung pengertian pula pendidikan terhadap anak. Pendidikan mungkin terdiri dari keluarga si anak dan mungkin pula bukan dari keluarga si anak dan ia merupakan pekerjaan profesional, sedangkan *hadanah* dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si anak, kecuali jika si anak tidak mempunyai keluarga serta ia bukan profesional, dilakukan oleh setiap ibu, serta anggota kerabat yang lain. *Hadanah* merupakan suatu hak dari *hadhin* (orang yang berhak mengasuh anak), sedangkan pendidikan belum tentu merupakan hak dari seorang pendidik.[20]

Hadhanah (*pengasuhan anak*) hukumnya wajib, karena anak yang masih memerlukan pengasuhan ini akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakan. Selain itu ia juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya. *Hadhanah* sangat terkait dengan tiga hak:

1. Hak wanita yang mengasuh.
2. Hak anak yang diasuh.
3. Hak ayah atau orang yang menempati posisinya.

Jika masing-masing hak ini dapat disatukan, maka itulah jalan yang

[19] Sulaiman Rasyid, *fiqih Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2003, hlm. 426.
[20] Abd. Rahman Ghazaly, *Op.Cit*, hlm.176.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

terbaik dan harus ditempuh. Jika masing-masing hak saling bertentangan, maka hak anak harus didahulukan daripada yang lainnya. Terkait dengan hal ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Satu-satunya aturan yang dengan jelas dan tegas memberikan pedoman bagi hakim dalam memutus pemberian hak asuh atas anak tersebut terdapat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan: "Dalam hal terjadi perceraian :

a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

4. Penelitian Terdahulu

Berikut bisa dilihat persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu yaitu:

Tabel I.2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Relevan Dengan Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Anton Afrizal Candra, Tinjauan Terhadap Perkawinan Di Bawah Tangan menurut Hukum Islam. Hasil penelitian menyatakan bahwa Status perkawinan dibawah tangan ditinjau dari Hukum Islam adalah sah apabila memenuhi rukun dan semua syarat sahnya nikah meskipun tidak	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai ketentuann hukum Islam dalam hal ruang lingkup perkawinan	Penelitian yang penulis kaji lebih spesifik mengkaji mengenai akibat dari perceraian namun peneliti ini mengarah kepada akibat dari

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

	dicatatkan. Menurut ketentuan pada Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan, sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu dipastikan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan supaya mempunyai kekuatan hukum. akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan, meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah di mata hukum negara. Akibat hukum perkawinan tersebut berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial, serta bagi anak yang dilahirkan sepanjang bisa di buktikan secara biologis maka dia akan mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2010.[21]		perkawinan di bawah tangan.
2.	Meita Djohan OE, dengan judul jurnal: Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA TnK), hasil penelitian menyatakan bahwa hak asuh anak adalah jika dilihat dari	Penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai akibat yang ditimbulkan setelah perceraian	Penelitian yang penulis teliti lebih menekankan kepada pemberian nafkah iddah dan nafkah anak

[21] Anton Afrizal Candra, *Tinjauan Terhadap Perkawinan Di Bawah Tangan menurut Hukum Islam*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau ISBN 978-979-3793-71-9, hlm. 29

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

	segi normatif, anak yang masih dibawah umur 12 tahun adalah hak asuh pada ibunya, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/007 tanggal 7 Desember 2007 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dari siapa yang paling berhak, akan tetapi yang harus dilihat dan dikedepankan adalah kepentingan yang terbaik bagi anak.[22]	serta mengenai hak anak	sedangkan penelitian terdahulu lebih menekankan kepada penguasaan terhadap hak asuh anak.
3.	Maswandi, dengan judul jurnal: Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian, menyatakan bahwa mengenai yang berhak mengasuh anak yang belum dewasa setelah terjadinya perceraian kedua orang tua wajib memelihara, mendidik anak mereka serta untuk bapak agar dapat menafkahi anak tersebut hingga ia dewasa. Karena itu tidak benar jika salah satu dari orang tua menganggap ia yang lebih berhak memelihara anak hanya dengan melihat kemampuannya untuk mencukupi kebutuhan anak dari segi materilnya saja. Namun perlindungan anak untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan secara lahir dan batin. Masalah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan tentang hak asuh anak yang belum dewasa, hakim memberikan kewajiban untuk memelihara anak-	Penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai akibat yang ditimbulkan setelah perceraian serta mengenai nafkah yang seharusnya diterima oleh anak baik dalam bentuk pemeliharaan dan pendidikannya	Penelitian yang penulis teliti lebih menekankan kepada pemberian nafkah iddah dan nafkah anak secara kesluruhan namun pada penelitian terdahulu lebih menekankan kepada pemeliharaan dan pendidikannya

[22]Meita Djohan OE, *Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA TnK)* , Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung Volume 11 Nomor 1 Januari 2016, hlm.67

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

	anak dan pendidikan mereka teletak baik pada ayah maupun ibu. Perselisihan tentang kekuasaan orang tua diputuskan oleh hakim.[23]		
4.	Mansari, dengan judul jurnal: Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Suatu Kajian Empiris Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, menyatakan bahwa Majelis hakim yang mengadili sengketa pengasuhan anak sangat berhati-hati dalam menentukan orang yang lebih berhak mengasuh anak. Secara regulasional, ibu merupakan orang yang lebih berhak mengasuh anak, akan tetapi tidak menutup kemungkinan hakim memberikannya kepada ayah bila kriteria seorang pengasuh terpenuhi. Prioritas utama bagi majelis hakim adalah terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Dasar pertimbangan hakim memberikan hak asuh kepada ayah yaitu kemashlahatan anak, persetujuan bersama untuk diserahkan kepada salah satu pihak, memeriksa saksi yang dihadirkan oleh penggugat dan tergugat, faktor ekonomi, ibunya tidak bertanggungjawab, kedekatan anak antara ayah atau ibunya, ibunya ibu meninggal.[24]	Penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai hak anak	Penelitian yang penulis teliti lebih menekankan kepada pemberian nafkah iddah dan nafkah anak secara keseluruhan namun pada penelitian terdahulu lebih menekankan kepada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hak asuh anak
5.	Muhammad Ridwan, Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut'ah, menyatakan bahwa Pelaksanaan eksekusi terkait dengan kewajiban memberikan nafkah bagi bekas suami sebelum ikrar talak tidak diatur dalam undang undang, namun prakteknya hakim	Penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai nafkah iddah	Penelitian yang penulis teliti lebih menekankan kepada pelaksanaan pemberian nafkah iddah namun pada penelitian

[23]Maswandi, *Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2017) hlm. 29

[24]Mansari, *Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Suatu Kajian Empiris Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*, Jurnal Petita, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda AcehVolume 1 Nomor 1, April 2016, hlm 15

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

	selalu berusaha agar bekas suami melaksanakan kewajibannya yaitu memberi nafkah untuk bekas istri sebelum dibacakan ikrar talak. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi isi putusan terkait nafkah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Hakim Pengadilan Agama Semarang selalu mengantisipasi dengan cara hakim mewajibkan bagi bekas suami untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah kepada bekas istri sebelum pengucapan ikrar talak. Dalam prakteknya eksekusi nafkah tersebut tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada aturan hukum yang jelas yang mengatur tentang eksekusi sebelum ikrar talak, bahwa upaya yang bisa dilakukan oleh bekas istri apabila mantan suami enggan memberikan nafkah iddah, mut'ah adalah mengajukan permohonan eksekusi terkait hak hak nafkah yang seharusnya diterima melalui ketua pengadilan agama.[25]		terdahulu lebih menekankan kepada eksekusi dari pengadilan mengenai nafkah iddah
6.	Nandang Ihwanudin, dengan judul Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama, menyatakan bahwa kewajiban mantan suami tidak dijalankan secara sukarela maka dapat diajukan upaya permohonan eksekusi putusan ke Pengadilan Agama yang memeriksa perkara tersebut. Permohonan tersebut dapat didasarkan pada hukum acara peradilan umum yaitu pasal 197 HIR atau 207-208 RBg. Upaya tersebut dapat dilakukan pihak mantan isteri meskipun hasilnya berdasarkan penilaian majlis	Penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai kewajiban yang diberikan oleh mantan suami setelah terjadiya perceraian	Penelitian ini lebih menekankan kepada kewajiban yang harus dilakukan oleh mantan suami secara luas namun penelitian yang penulis kaji lebih mengarah kepada nafkah iddah dan anak saja.

[25] Muhammad Ridwan, *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut'ah,* Jurnal USM Law Review Vol 1 No 2 Tahun 2018, hlm. 245.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

	hakim yang memeriksa perkara tersebut.[26]		
7.	Diana Yulita Sari, dengan judul penelitian Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak" (Studi Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006), menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat materil dan tanggung jawab yang bersifat pengasuhan. Tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat materil dalam konsep Islam merupakan kewajiban ayah, sedangkan tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat pengasuhan adalah tanggung jawab ibu. Dalam berbagai literatur fikih yang paling berhak atas pengasuhan anak diberikan kepada ibu selama anak tersebut belum mumayyiz. Dan apabila anak tersebut sudah mumayyiz, maka anak tersebut disuruh memilih kepada siapa di antara ayah dan ibunya. Kesimpulan penelitian ini adalah *Hadhanah* atau pemeliharaan anak dalam hukum perkawinan yang ada di Indonesia pada dasarnya tidak menentukan perihal siapakah yang lebih berhak dalam hal mendapatkan hak pemeliharaan anak. Hal tersebut kembali kepada kepentingan anak yang didasari pada putusan pengadilan.[27]	Penelitian ini memiliki kesamaan dalam mengkaji mengenai hak anak sebagai akibat dari adanya perceraian	Penelitian ini hanya mengkaji mengenai hak anak saja namun penulis mengkaji mengenai hak mantan istri dan anak.
8.	Moh. Sitta Fathurrohman, dengan judul penelitian Hak Asuh Atas Anak	Penelitian ini memiliki	Penelitian ini lebih mengkaji menurut

[26] Nandang Ihwanudin, *Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama,* Jurnal Aqliya Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Siliwangi Bandung, Vol 1 No 1 Juni 2016

[27] Diana Yulita Sari, *Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak" (Studi Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006),* Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010, hlm.84

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

	Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Setelah Terjadi Perceraian Antara Suami Dan Isteri, menyatakan bahwa *Hadhanah* adalah pemeliharaan dan mendidik seorang anak laki-laki maupun anak perempuan yang belum mumayyiz dan belum dapat berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri. Ibunyalah yang berhak untuk mengasuhnya, tetapi nafkah menjadi tanggungan sang ayah meliputi masalah ekonomi, pendidikan, dan segala kebutuhan pokok anak tersebut hingga dewasa berupa pengawasan dan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Persoalan yang akan timbul setelah terjadinya perceraian cukup banyak diantaranya mengenai hubungan bekas suami dan bekas isteri, seringkali terjadi masalah baru seperti pembayaran mahar yang masih belum lunas dibayarkan oleh pihak bekas suami kepada pihak bekas isterinya, kemudian bekas suami tidak mau memberikan nafkah kepada bekas isteri sebelum masa iddahnya selesai. Mengenai persoalan pemeliharaan anak, seringkali menjadi persoalan oleh kedua orang tuanya untuk mengasuh anak yang menjadi korban dari perceraiannya. Kesimpulan penelitian ini adalah Hukum Islam dalam menangani masalah pengasuhan anak yaitu dengan melihat anak tersebut dekat dengan siapa, dengan bapaknya ataukah ibunya, dan apabila anak tersebut sudah dewasa, hukum Islam juga memberikan kebebasan kepada sang anak untuk memilih kepada siapa anak tersebut akan ikut, dan apabila anak tersebut belum dewasa lebih mengutamakan ibunyalah yang mengasuhnya atau yang lebih dekat	kesamaan dalam mengkaji mengenai hak anak sebagai akibat dari adanya perceraian	dua spesifik yaitu hukum islam dan hukum adat, sedangkan penulis mengkaji mengenai hukum islam dan hukum nasional serta penulis juga mengkaji mengenai hak anak secara umum sedangkan penelitian terdahulu hanya mengkaji mengenai hak asuh anak saja.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

	dengannya. Adapun mengenai jangka waktu pemeliharaannya hukum Islam memberikan waktu 7 tahun bagi anak laki-laki dan 9 tahun bagi anak perempuan, tetapi para imam mazhab ada yang menentukan 9 tahun bagi laki-laki dan 11 tahun bagi anak perempuan, mereka menetapkan hanya dengan fatwa sendiri dengan melihat kesejahteraan anak itu, karena tidak ada satu Nash pun dalam al-Qur'an yang menjelaskan secara rinci tentang hal tersebut. Sedangkan dalam pandangan hukum Adat apabila seorang suami isteri bercerai atau meninggal dunia,masalah pengasuhan, ditentukan berdasarkan sistem kekerabatannya, misalnya pada sistem kekerabatan patrilineal, apabila kedua orang tua bercerai, maka sang anak ikut kepada keluarga sang ayahsedangkan pada sistem kekerabatan matrilineal, sang anak ikut kepada ibunya, sedangkan pada sistem kekerabatan yang menganut sisitem kekerabatan parental (keorangtuaan), yang dapat dikatakan lagi tidak mempertahankan garis keturunan, apabila seorang suami atauisteri bercerai atau meninggal dunia, sang anak dikuasai dan dimiliki oleh sang ayah (suami), kecuali apabila sang ayah tidak mampu memeliharanya, maka boleh ditangani oleh sang ibunya. Ketentuan tersebut tidak bisa dirubah karena dalam masyarakat Adat sistem kekerabatan sangat penting sekali dalam kehidupannya.[28]		
9.	Lulus Utisna Sari, dengan judul penelitian Pemberian Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat	Sama-sama meneliti megenai anak akibat dari	Penelian ini lebih mengarah kepada hak asuh anak

[28]Moh. Sitta Fathurrohman, *Hak Asuh Atas Anak Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Setelah Terjadi Perceraian Antara Suami Dan Isteri*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008, hlm. 76

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

	Perceraian Terhadap Orangtua Laki-Laki (Ayah) Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Putusan PA Semarang No: 0751/pdt.G/2012/PA.sm), menyatakan bahwa Perebutan hak asuh anak di bawah umur sering terjadi ketika terjadi perceraian. Menurut undang-undang, anak dibawah umur hak asuh anak berada ditangan ibu. Akan tetapi ada sebab-sebab lain yang dapat memberikan hak asuh anak terhadapayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian kepada orangtua laki-laki dan strategi Pengadilan Agama Semarang dalam melindungi hak-hak anak setelah adanya putusan pengadilan. Kesimpulan penelitian ini adalah Dalam Putusan Nomor : 0751/Pdt.G/2012/PA.Sm. Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian hak asuh anak kepada ayah melalui pertimbangan bahwa sang Ibu telah meninggalkan keluarganya dan meninggalkan anak-anaknya serta berakhlak tidak baik dengan tinggal bersama laki-laki lain tanpahubungan perkawinan. Sedangkan Majelis Hakim menyebutkan bahwa ketika dipersidangan ibu terbukti berkahlak tidak baik, kufur atau keluar dari Islam (murtad), maka hakim wajib memberikan hak hdalanah kepada ayah. Pertimbangan lain yang dapat memberikan hak asuh anak dibawah umur kepada ayah adalah jika ibu berbuat lalai dengan meninggalkan anak-anaknya, memiliki penyakit yang tidak memungkinkan si ibu untuk memenuhi hak anak (seperti sakit jiwa, cacat, dan lain	adanya perceraian	kepada ayahnya, sedangkan penulis mengkaji mengenai nafkah anak yang diberikan oleh seorang ayah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

	sebagainya), sering marah dan berkelakuan buruk (seperti sering mabuk, Judi, menggunakan narkotika, dan lain sebagainya). Dari beberapa pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh anak dibawah umur kepada ayah, yang menjadikan alasan utama hakim mempertimbangkan hak hadlanah kepada ayah adalah karena sang Ibu telah keluar dari Islam (murtad). Karena ruang lingkup hadlanah juga meliputi pendidikan agamanya. Sehingga jika ibunya kafir, maka memungkinkan anak tersebut akan terpengaruh dengan ibunya.[29]		
10.	Ani Sri Duriyati, Dengan Judul Penelitian Tesis Yaitu Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri Dan Anak Dalam Praktek Di Pengadilan Agama Semarang, Menyatakan Bahwa Dalam gugatan (cerai talak) suami terhadap istri, hakim diberikan kewenangan oleh undang-undang membebani suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah terhadap istri. Istri juga diberikan hak untuk mengajukan gugatan balik untuk nafkah anak, iddah dan mut'ah. Jika cerai gugat dari istri, disamping mengajukan gugatan perceraian sekaligus mengajukan nafkah untuk istri (diri sendiri/penggugat) dan nafkah anak. Permohonan istri atas nafkah, biaya pemeliharaan anak, dan harta perkawinan dapat juga terjadi selama proses pemeriksaan berlangsung, pengadilan agama dapat menentukan jumlahnya yang disesuaikan dengan kemampuan suami dan tidak memberatkannya. Pelaksanaan	Sama-sama mengkaji mengenai nafkah iddah dan anak	Penelitian ini mengkaji mengenai pelaksanaan dari putusan dalam mengajukan gugatan sedangkan penulis hanya mengkaji mengenai pemberian nafkah iddah dan anak.

[29] Lulus Utisna Sari, *Pemberian Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Terhadap Orangtua Laki-Laki (Ayah) Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Putusan PA Semarang NO : 0751/pdt.G/2012/PA.sm)",* Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013, hlm.113-114

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

	nafkah iddah, mut'ah serta nafkah untuk anak, eksekusi riil dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela, atau oleh pengadilan melalui juru sita pengadilan setelah ada permohonan apabila salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Pengadilan tidak akan melaksanakan eksekusi apabila tidak ada permohonan eksekusi dari yang dirugikan.[30]		
11.	Jamiliya Susanti, dengan judul penelitian Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Di Pengadilan Agama Sumenep-Madura, dengan hasil penelitian adalah implementasi pemenuhan nafkah anak pasca putusnya perkawinan karena perceraian Pengadilan Agama Sumenep dapat dikatakan tidak sepenuhnya mencapai sasarab. Dalam hal ini dianalisa dengan menggunakan teori efektivitas hukum dalam menentykan besarnya kecilnya nafkah menggunakan asas kepatutan dan kemampuan dalam memberikan hukuman pada ayah, meminta nafkah anak sebelum pembacaaan ikrar talak yang tidak dipenuhi sebelumnya bersamaan dengan nafkah iddah istri, memberikan saran kepada pihak istri saat akhir persidangan kalai misalnya mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya pasca putusan untuk melaporkan kembali, adapaun upaya yang ditempuh oleh ibu agar ornag tua laki-laki melaksanakan kewajibannya dalam membiayai hidup anak pasca bercerai yaitu dengan melaporkan ke pengadilan,	Penelitian ini sama meneliti mengenai pelaksaan pemenuhan terhadap nafkah anak	Penelitian ini hanya mengkaji mengenai nafkah anak saja namun penulis lebih menekankan kepada nafkah idda dan anak, serta peneltian ini juga lebih mengarah kepada upaya yang dilakukan jika pemenuhan nafkah tidak diberikan oleh mantan suami.

[30] Ani Sri Duriyati, *Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri Dan Anak Dalam Praktek Di Pengadilan Agama Semarang*, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2009, hlm 78-79.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

	dalam hal eksekusi, berusaha untuk selalu memperingatkan kepada mantan suami.[31]		

E. Konsep Operasional

Suatu konsep operasional merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti, sedangkan konsep atau variabel merupakan abstraksi dari gejala atau fenomena yang akan diteliti. Konsep operasional pada hakekatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih kongkrit dari pada kerangka teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Konsep operasional ini dibuat untuk menghindari salah pemahaman dan penafsiran dan memberikan arah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Tinjauan yuridis adalah suatu tinjauan menurut hukum atau dari segi hukum.[32]

Analisis Yuridis adalah kegiatan penelaahan dan interpretasi atau proses penafsiran fakta-fakta hukum yang dikaitkan dengan bahan-bahan hukum yang relevan, dengan cara mengklasifikasikan fakta-fakta hukum sesuai dengan permasalahan hukum yang dikaji, dan dinilai dengan sumber-sumber hukum yang relevan apakah sesuai atau tidak.

[31] Jamiliya Susanti, *Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Di Pengadilan Agama Sumenep-Madura*, Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014, hlm. 190.

[32] M. Marwan, *Kamus Hukum, Realty Publiser*, Surabaya, 2009, hal. 651

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Putusan adalah produk akhir penyelesaian suatu perkara di Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam satu perkara yaitu Penggugat dan Tergugat.[33]

Nafkah Iddah atau nafkah cerai adalah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada mantan istrinya berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka, nafkah ini berlangsung selama 3-12 bulan tergantung kondisi haid istri yang dicerai.[34]

Nafkah Anak adalah suatu pembiayaan yang diterima oleh anak dari orang tuanya sebagai haknya dan merupakan kewajiban dari orang tuanya (khusus ayah).[35]

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang perkawinan untuk menjelaskan "perceraian" atau berakhirnya perceraian antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.

Pengadilan agama adalah Pengadilan tingkat pertama yang berwewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam[36] di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat hibah, wakaf, zakat, infak, sadaqah dan ekonomi syari'ah berdasarkan hukum islam.[37]

---

[33] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Rajawali Press, 1991, hal. 199

[34] Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hal. 667.

[35] Pengertian ini dapat diambil dari ketentuan Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 233.

[36] Penjelasan umum Undang-undang Nomor 27 tahun 1989 tentang peradilan agama. Dalam penjelasan umum tersebut pada angka 2 juga disebutkan bahwa Pengadilan Agama merupakan pelaksaan kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama.

[37] Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi yang dianggap paling sesuai dengan keadaan objek penelitian ini, sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum empiris, dengan kajian *Socio-Legal Research* yakni penelitian sosial tentang hukum, dimana suatu penelitian yang bersifat hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Penelitian ini menitikberatkan kepada suatu proses bekerjannya atau pengaruh hukum dalam kehidupan sosial.[38] Sedangkan dilihat dari sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan dan menulis fakta yang diteliti dilapangan tentang Akibat Hukum Perceraian Terhadap Penyelesaian Sengketa Nafkah Iddah Dan Nafkah Anak Di Pengadilan Agama Pekanbaru.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah Penyelesaian Sengketa Nafkah Iddah Dan Nafkah Anak Di Pengadilan Agama Pekanbaru.

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan Di Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan alasan bahwa Di Pengadilan Agama Pekanbaru tingkat

[38] Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel,* Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 181.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perceraian sangat tinggi sehingga sangat mempermudah penulis untuk menggali kesesuaian putusan dengan pelaksanaan pemberian nafkah iddah dan nafkah anak tersebut.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan obyek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menemukan dalam penelitian. Berikut penulis paparkan populasi penelitian:

a. Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yang diwakilkan oleh Panitera sebanyak 1 orang.
b. Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru sebanyak 1 orang .
c. Pemohon dan termohon sebanyak 2153 orang. Namun dikarenakan mengingat keterbatasan penulis untuk menemui pemohon dan termohon, maka penulis mengambil 30 orang saja untuk membantu penulis membahas permasalahan yang diteliti yang dilihat dari ukuran yang memiliki anak dibawah umur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Untuk tercapainya maksud dan tujuan penelitian ini, maka yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel I.3
Populasi dan Sampel

No	Kriteria Populasi	Jumlah		%	Teknik Penentuan Responden
		Populasi	Sampel		
1	Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yang diwakilkan oleh panitera	1	1	100%	Sensus
2	Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru	18	1	5,5%	Purposive Sampling
3	Pemohon dan Termohon	2153	30	1,4%	Purposive Sampling
Jumlah		2172	32	1,5%	

Sumber : Data Lapangan, 2020

Berdasarkan tabel I.1 tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa adapun metode penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil setiap unsur populasi dan sampel secara keseluruhan dengan menggunakan metode sensus karena populasinya kecil, sehingga memungkinkan penulis menggunakan populasi secara keseluruhan sebagai responden yaitu kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yang diwakilkan oleh Panitera.

Sedangkan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, Pemohon dan Termohon, penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. (Syafrinaldi, 2015: 17) Metode *purposive* yaitu dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu, dengan ciri-ciri seperti keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya serta dengan alasan mereka memiliki sifat dan karakter yang homogen atau pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang dianggap relevan atau dapat mewakili objek yang akan diteliti.

5. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini pada dasarnya dapat dibedakan atas dua jenis data yaitu :

1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan alat pengumpul data mengenai:
   a. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Penyelesaian Sengketa Nafkah Iddah Dan Nafkah Anak Di Pengadilan Agama Pekanbaru.
   b. Kendala Bagi Mantan Suami Untuk Menjalankan Kewajibannya Dalam Pemberian Nafkah Iddah dan Anak Setelah Putusnya Perkawinan Karena Perceraian.
2) Sumber Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka, termasuk didalamnya literatur, Peraturan perundang undangan, artikel-artikel pada media online dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Alat Pengumpulan Data.

Untuk mempermudah data yang dipertanggung jawaban dalam penelitian ini, maka alat pengumpul data berupa wawancara adalah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berupa informasi yang diperoleh melalui proses tanya jawab secara tatap muka dengan responden, yaitu yang bertujuan untuk mencari data atau mendukung data yang telah ada.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara kemudian penulis kumpulkan dan klasifikasikan menurut bentuk dan sifatnya. Setelah terkumpul kemudian diolah. Setelah diolah kemudian disajikan dalam uraian kalimat. Selanjutnya dianalisis dan dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli serta peraturan perundang-undang berlaku.

8. Penarikan Kesimpulan.

Metode penarikan kesimpulan akhir secara induktif yaitu dari keadaan yang khusus kepada hal yang umum. yang khusus adalah peraturan perundang-undangan yang disesuaikan pada lokasi tempat peneliti melakukan dalam penelitian baik berupa subjek dan objek penelitian sedangkan dalam kesimpulan yang termasuk dalam kesimpulan secara umum adalah analisis yang dapat dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli yang terutang kedalam tinjauan kepustakaan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Profil Pengadilan Agama Pekanbaru

1. Sejarah Pengadilan Agama Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura yang diundangkan pada tanggal 9 Oktober 1957dalam Lembaran Negara tahun 1957 No.99. Maka Menteri Agama RI pada tanggal 13 November 1957 mengeluarkan Penetapan Menteri Agama Nomor: 58 tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Sumatera. Dalam Penetapan tersebut ada beberapa Pengadilan Agama yang dibentuk secara bersamaan yakni Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, Bangkinang, Bengkalis, Rengat dan Tanjung Pinang. Berdasarkan kata Mufakat dari beberapa Alim Ulama dan Cendikiwan yang berada di Pekanbaru khususnya Riau maka diusulkanlah sebagai Pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru KH. Abdul Malik anggota Mahkamah Syari'ah Sumatra Tengah yang berkedudukan di Bukittinggi,dan atas usulan tersebut pemuka masyarakat yang ada di Riau melalui KH. Mansur, Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Bukittinggi, Bapak KH, Djunaidi, Kepala Jawatan Peradilan Agama Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1958 secara resmi melantik KH. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama Mahkamah Syari'ah Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dengan dilantiknya KH Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru maka secara Yuridis Pengadilan Agama telah berdiri,dan atas dasar hari pelantikan tersebut maka tanggal 1 Oktober 1958 ditetapkan sebagai hari jadi Pengadilan Agama Pekanbaru. Dengan demikian pada saat ini Pengadilan Agama Pekanbaru berumur 49 tahun.

Pada awal beroperasinya, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah Pekanbaru hanya menempati sebuah kamar kecil yang berdampingan dengan kantor Kepala Urusan Agama Kota Praja Pekanbaru di Jalan Rambutan Kecamatan Pekanbaru Kota. Dengan Meubeller yang hanya satu meja panjang. Kemudian sekitar 1963 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor dengan menyewa rumah penduduk di Jalan Sam Ratulangi Kecamatan Pekanbaru Kota dan sekitar tahun 1969 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah lagi dengan menumpang dikantor Dinas Pertanian Pekanbaru kota dan pada tahun itu juga KH. Abdul Malik (Ketua Pertama) meninggal dunia tanggal 1 Januari 1970".

Sepeninggal Almarhum KH. Abdul Malik kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru digantikan oleh Drs. Abbas Hasan yang sebelumnya sebagai Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru. Sehingga sekitar tahun 1972 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru menyewa rumah Pekanbaru pindah kantor Jalan Kartini Kecamatan Pekanbaru Kota dengan menempati kantor sendiri.

Pada tahun 1979 terjadi pergantian pimpinan dari Drs.H.Abbas Hasan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang pindah sebagai Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang kepada Drs. H. Amir Idris. Pada saat kepemimpinan ketua Bapak Drs.H. Amir Idris (1982) Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Pelanduk Kecamatan Sukajadi hingga April 2007 dengan beberapa kali pergantian Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yakni Drs. Marjohan Syam (1988-1994), Drs. Abdulrahman HAR, S.H. (1994-1998). Drs. H. Lumban Hutabarat, S.H., M.H. (1998-2001), Drs. Zein Ahsan (2001-2004), Drs, Harun S, S.H. (2004-2006), Drs. Syahril, SH, MH ((2006-2007) PYMT), Drs. H. Masrum (2007 - 2009), Drs, Taufik Hamami (2009-2010), Drs. H. Firdaus HM, S.H., M.H. (2019-2012), Drs. Abu Thalib Zisma (2012-2015), Drs. H. Syairuddin, S.H., M.H. (2015- 2021). Drs. Ahmad Sayuti, M.H. (2021- Sekarang)

Pada saat Pengadilan Agama Pekanbaru dipimpin oleh Drs. H. Masrum, M.H., pada bulan April 2007 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di jalan Rawa Indah Arifin Ahmad No. 1 Pekanbaru. Pada saat Pengadilan Agama Pekanbaru dipimpin oleh Drs. Abu Thalib Zisma Tahun 2015 Pengadilan Agama Pekanbaru pindah kantor di Jalan Dt. Setia Maharaja /Parit Indah Pekanbaru.

Perjalanan panjang perjuangan menuju Eksistensi Pengadilan Agama Pekanbaru, yang berpindah-pindah kantor dengan menyewa rumah penduduk dan menumpang di Instansi lain selama 24 tahun menjadikan citra Pengadilan Agama Pekanbaru sangat naif, namun dari waktu ke waktu citra tersebut semakin membaik berkat uluran tangan Gubemur Riau Bapak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Arifin Ahmad yang berkenan membayar sewa rumah untuk kantor Pengadilan Agama Pekanbaru di Jalan Singa, dan menitipkan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berkantor di Komplek Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, termasuk Walikota Bapak Drs.H. Herman Abdullah M.M, yang sejak tahun 2005 telah memberikan perhatian kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan memasukkan Ketua Pengadilan Agama kedalam Protocol Muspida dan memberi Fasilitas mobil untuk Jabatan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru. Sejak tanggal 1 Juli 2004 semua Badan Peradilan, termasuk Pengadilan Agama Pekanbaru, telah menjadi satu atap dibawah Makamah Agung RJ, bersama-sama dengan Peradilan lainnya, secara Yuridis Pengadilan Agama Pekanbaru telah memiliki derajat yang sejajar dengan Badan Peradilan lainnya, namun secara Factual masih terdapat kesenjangan yang masih memerlukan perhatian serius menuju kesetaraan antara lembaga-lembaga Peradilan di Indonesia.

2. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Pekanbaru

Dengan adanya berbagai pembaruan dan dorongan eksternal melalui Reformasi Birokrasi (RB), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan berbagai kondisi yang sangat dinamis merupakan tantangan dalam proses perubahan, maka dinilai perlu arah dan langkah dalam mencapai cita-cita.Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi. Berkenaan dengan hal ini, pada tanggal 10 September 2009 Mahkamah Agung Repub-

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

lik Indonesia merumuskan Visi badan peradilan, yaitu Terwujudnya Peradilan Yang Agung. Berkaitan dengan visi ini, karena Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan salah satu dari empat lingkungan lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, maka Visi Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan derivasi dari visi Mahkamah Agung, sehingga, yaitu Terwujudnya Pengadilan Agama Pekanbaru Yang Agung.

Untuk mewujudkan visi sebagai kondisi ideal yang akan dicapai pada kurun tertentu, maka perlu ditetapkan misi yang merupakan pekerjaan pokok untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Bertitik tolak dari visi Pengadilan Agama Pekanbaru yang merupakan derivasi dari misi Mahkamah Agung, maka misi Pengadilan Agama Pekanbaru juga sejalan diderivasi dari misi Mahkamah Agung, sehingga "misi Pengadilan Agama Pekanbaru rumusannya sebagai berikut:

1. Menjaga kemadirian Pengadilan Agama Pekanbaru
2. Memberi Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Pimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Daftar Nama Ketua PA Pekanbaru

Daftar Nama Ketua PA Pekanbaru (Terdahulu Sampai Sekarang):

Pengadilan Agama Pekanbaru		
No	**Nama Ketua**	**Waktu Jabatan**
1	K.H. Abdul Malik	1958 - 1970
2	Drs. Abbas Hasan	1970 - 1979
3	Drs. Amir Idris	1979 - 1988
4	Drs. Marjohan Syam, S.H	1988 – 1994
5	Drs. Abdurrahman Har, S.H.	1994 – 1998
6	Drs. H. Lumban Hutarabarat	1988 – 2001
7	Drs. Zein Hasan	2001 – 2004
8	Drs. H. Harun S, S.H., M.H.	2004 – 2005
9	Drs. Masrum, M.H	2007 – 2009
10	Drs. H. Taufiq Hamami, S.H.,M.H	2009 – 2010
11	Drs. H. Firdaus HS., S.H., M.H	2010 – 2012
12	Drs. Abu Thalib Zisma	2012 – 2015
13	Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H	2015 – 2019
14	Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H	2019 – 2020
15	Drs. H. Usman, S.H., M.H	2020 – 2020

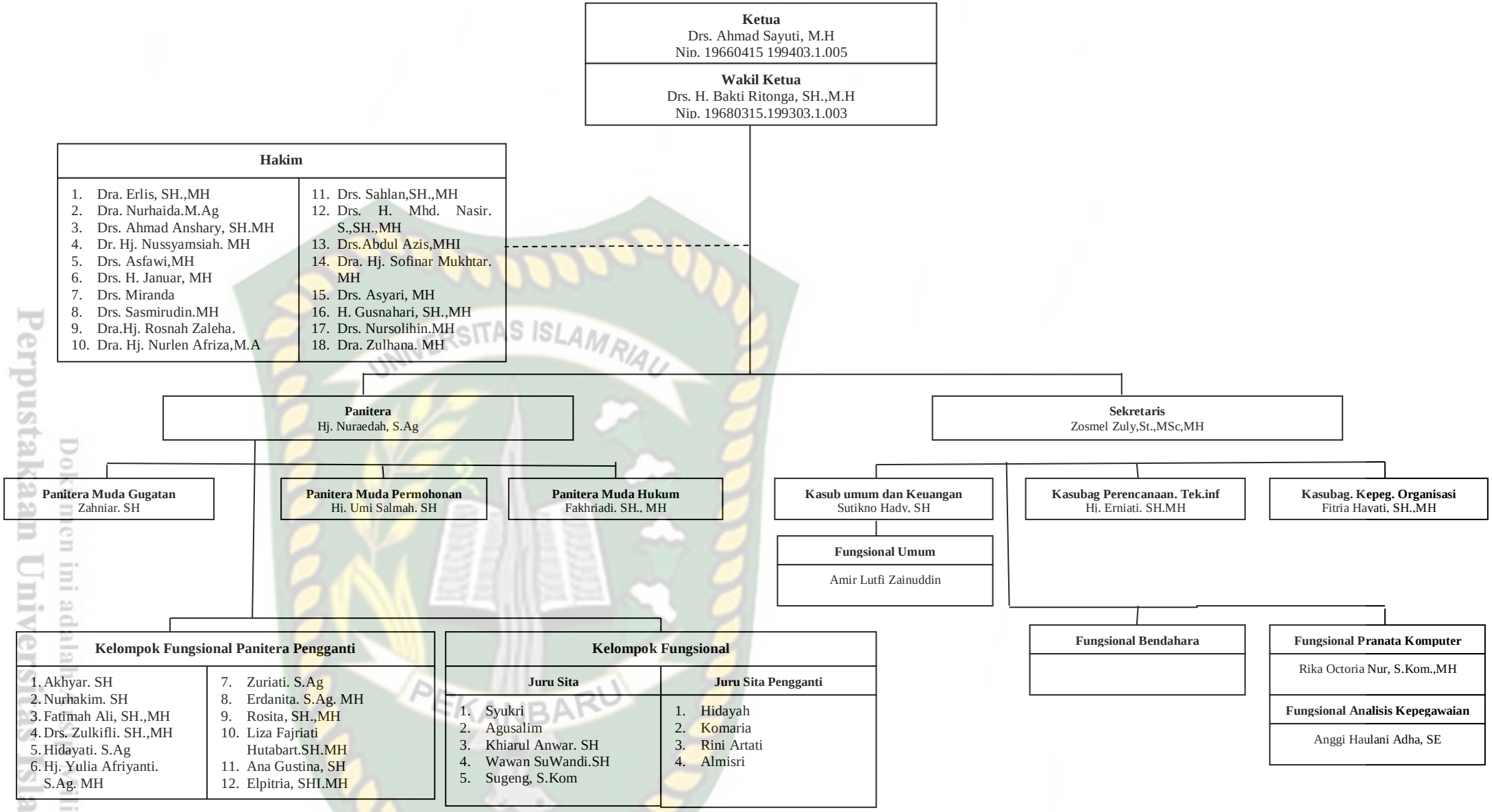
Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Daftar Nama Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru

Hakim Pengadilan agama Pekanbaru			
No	**Nama**	**Jabatan**	**Ket.**
1	Drs. Ahmad Sayuti, M.H.	Ketua	Ada
2	Drs. H. Bhakti Ritonga, S.H., M.H	Wakil Ketua	Ada
3	Dra. Erlis, S.H., M.H	Hakim	Ada
4	Drs. Ali Amran, S.H.	Hakim	Ada
5	Drs. Ahmad Anshary M, S.H., M.H	Hakim	Ada
6	Dra. Hj. Nursyamsiyah, M.H	Hakim	Ada
7	Drs. Asfawi, M.H	Hakim	Ada
8	Drs. H. Januar	Hakim	Ada
9	Drs. H. Sasmiruddin, M.H	Hakim	Ada
10	Drs. H. Mhd.Nasir S, S.H., M.H	Hakim	Ada
11	Drs. Abdul Aziz, M.Hi	Hakim	Ada
12	Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H	Hakim	Ada
13	Drs. Asyari, M.H	Hakim	Ada
14	Drs. Gusnahari, S.H., M.H	Hakim	Ada
15	Drs. Sayuti, M.H	Hakim	Ada
16	Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.A	Hakim	Ada
17	Dra. Nurhaida, M.Ag	Hakim	Ada
18	Dra. Zulhana, M.H	Hakim	Ada

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Sejarah Lahirnya Hukum Perkawinan Di Indonesia

Keberadaan pengaturan mengenai perkawinan di Indonesia merupakan hal yang penting. Dikarenakan pengaturan tersebut dijadikan pedoman bagi masyarakat untuk melaksanakan perkawinan. Undang-Undang Perkawinan yang berlaku pada saat sekarang sudah menjadi landasan hukum bagi masyarakat. Sehingga meskipun sebelumnya telah ada juga pengaturan yang mengatur namun tidak bertentangan dengan ketentuan ini maka hal tersebut tetap dapat diterima.[39]

Pada dasarnya aturan hukum yang mengatur sebelum disahkannya Undang-Undang perkawinan nasional tetap dapat berlaku sepanjang peruntukannya tidak melanggar ketentuan yang baru. Hal ini bagi yang melakukan perkawinan sebelum adanya Undang-Undang perkawinan nasional, seperti berikut:[40]

a. "Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum (perkawinan) Islam yang telah diresiplir dalam hukum adat;
b. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum perkawinan adat;
c. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijksordonnantie Christen Indonesia* (Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia) *Staatsblad* 1933 Nomor 74;
e. Bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa dan Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
f. Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum

[39] Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia,*Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 230.
[40] *Ibid.*,hlm. 230-231.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

(perkawinan) adat dan agama mereka masing-masing;

g. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata".

Latar belakang diterbitkannya "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" dikarenakan ketentuan yang mengatur mengenai perkawinan yang sudah berlaku pada masa lalu sudah dianggap tidak seimbang lagi dengan permasalahan perkawinan yang ada pada masa sekarang. Sehingga untuk memberikan suatu kepastian maka pemerintah menerbitkan kebijakan baru terhadap undang-undang tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaturan yang baru haruslah dilihat sebagai bentuk penyempurnaan suatu aturan perkawinan yang telah ada sebelumnya.[41]

Keberadaan "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" tidak hanya bertujuan untuk membuat ketentuan yang berlaku bagi segelintir orang saja tetapi ditujukan kepada setiap orang yang menajdi warga Negara Indonesia. Serta demi memperbaiki system dan mekanisme yang sudah berlaku dari dahulunya. Hal ini agar tercipta suatu kesempurnaan dalam pelaksanaan perkawinan yang dilakukan masyarakat. Berdasarkan "penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan antara lain menyatakan dalam undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan zaman dan

[41] Abdurrahman, *Usaha-Usaha Penyempurnaan Pelaksanaan UUP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 90.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tuntutan zaman".[42]

Pada dasarnya sebelum berlakunya aturan nasional yang ada pada saat sekarang masyakat Indonesia masih berpandangan kepada ketentuan Belanda. Namun tidak dipungkiri sampai sekarang ketentuan tersebut masih digunakan di Negara Indonesia hingga sekarang. Dimana penyatuan terhadap hukum yang menjadi produk Negara Belanda tersebut masih menjadi pembahasan dalam peraturan nasional. Dengan adanya pengaturan yang telah diberlakukan di Negara Indonesia, menjadikan penyatuan aturan hukum Belanda hal yang sulit untuk diterima pada saat sekarang, dikarenakan tidak menutup kemungkinan aturannya tidak sesuai lagi dengan perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia.

Untuk menghargai kehendak masyarakat Indonesia, pemerintah kemudian membuat kebijakan baru sebagai landasan pengaturan perkawinan yaitu tepatnya pada tahun 1974. Aturan tersebut menjadi aturan khusus untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan. Hingga saat sekarang aturan perkawinan yang telah ditetapkan menjadi suatu pedoman bagi setiap masyarakat Indonesia, namun tidak dapat dipungkiri juga masih ada masyarakat yang tidak mematuhi segala sesuatu yang telah ditetapkan itu.[43]

Pemerintah telah melakukan penyempurnaan aturan perkawinan sejak dahulu tetapi penyempurnaan tersebut mengalami kegagalan, dikarenakan adanya faktor social dan agama yang menjadi kepercayaan masyarakat

[42] Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 231.
[43] *Ibid.*,hlm. 233

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Indonesia. Hal tersebut disebabkan tidak mudahnya untuk menyatukan diantara keadaan social dan agama yang dianut oleh masyarakat. Untuk mewujudkan suatu penyempurnaan dibutuhkan suatu kehati-hatian agar tidak terjadi perpecahan ataupun perselisihan diantara masyarakat sebagai warga Negara.

Perhatian pemerintah terhadap pengaturan perkawinan tersebut merupakan usaha pembaharuan kebijakan hukum untuk mengatur permasalahan hukum keluarga. Tetapi pembaharuan tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan memang kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman terahadap tatatan kehidupan social dan keagamaan. Sehingga dikarenakan hal tersebut juga harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak membuat suatu gejala social.[44]

Tahun 1952 akhir, panitia telah membuat suatu Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang terdiri atas peraturan umum, yang berlaku untuk semua golongan dan agama dan peraturan-peraturan khusus yang mengatur hal-hal yang mengenai golongan agama masing-masing. Selanjutnya pada tanggal 1 Desember 1952 panitia menyampaikan Rancangan Undang-Undang Perkawinan Umum kepada semua organisasi pusat dan lokal dengan permintaan supaya masing-masing memberikan pendapat atau pandangannya tentang soal-soal tersebut paling akhir pada tanggal 1 Februari 1953. Rancangan yang dimajukan itu selain berusaha kearah kodifikasi dan unifikasi, juga telah mencoba memperbaiki keadaan

[44] Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan Dan Hukum Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia,* PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, hlm. 18.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

masyarakat dengan menetapkan antara lain :

1. "Perkawinan harus didasarkan kemauan bulat dari kedua belah pihak, untuk mencegah kawin paksaan ditetapkan batas-batas umur 18 bagi laki-laki dan 15 bagi perempuan;
2. Suami isteri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
3. Poligami diizinkan bila diperbolehkan oleh hukum agama yang berlaku bagi orang yang bersangkutan dan diatur sedemikian hingga dapat memenuhi syarat keadilan;
4. Harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama;
5. Perceraian diatur dengan keputusan Pengadilan Negeri, berdasarkan alasan-alasan yang tertentu, mengenai talak dan rujuk diatur dalam peraturan Hukum Islam;
6. Kedudukan anak sah atau tidak, pengakuan anak, mengangkat dan mengesahkan anak, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, pencabutan kekuasaan orang tua dan perwalian.

Tanggal 24 April 1953 diadakan *hearing* oleh Panitia Nikah, Talak dan Rujuk dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan, yang dalam rapatnya bulan Mei 1953 Panitia memutuskan untuk menyusun Undang-Undang Perkawinan menurut sistem yang berlaku:

1. "Undang-Undang Pokok yg berisi semua peraturan yang berlaku bagi umum bersama-sama (*uniform*), dengan tidak menyinggung agama;
2. Undang-Undang Organik, yang mengatur soal perkawinan menurut agama masing-masing, yaitu bagi golongan Islam, Kristen Katolik, dan golongan Kristen Protestan;
3. Undang-Undang untuk golongan netral, yaitu yang tidak termasuk suatu golongan agama itu".[45]

Tahun 1954 akhirnya panitia telah berhasil membuat Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan Umat Islam yang kemudian

[45] Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat,* Timun Mas, Jakarta, 2000, hlm. 180.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

disampaikan oleh Menteri Agama kepada Kabinet akhir bulan September 1957 dengan penjelasan masih akan ada amandemen-amandemen yang menyusul. Tetapi sampai permulaan tahun 1958 belum ada tindakan-tindakan apapun dari pemerintah mengenai soal undang-undang perkawinan itu.[46]

Pemerintah juga selama bertahun-tahun tidak memberikan tanggapan sampai pada tahun 1958 beberapa anggota wanita parlemen di bawah pimpinan Soemari, mengajukan rancangan inisiatif terpenting diantaranya, setidak-tidaknya bagi dunia Islam Indonesia sebuah masalah yang menggemparkan bahwa didalam usul inisiatif itu telah ditetapkan suatu keharusan untuk menjalankan monogami. Pemerintah pada waktu itu sudah memberikan reaksi dengan mengemukakan suatu rancangan yang hanya mengatur perkawinan Islam. Justru dari pihak Islam tradisional terdapat keraguan apakah bagi orang-orang Islam diperlukan hukum perkawinan. Bukankah peraturan-peraturan yang sekali telah diberikan Tuhan, sebagaimana yang telah diwahyukan secara cermat dalam syariat diperuntukkan untuk segala zaman dan negara. Bahan-bahan baru untuk didiskusikan yakni rencana-rencana tersebut tidak pernah dibahas selanjutnya.[47]

Satu setengah tahun setelah pengajuan pengusulan, dalam bulan Oktober 1959, Rancangan Undang-Undang Soemari tersebut ditarik kembali oleh para pengajunya, kendati memperoleh perhatian yang besar

[46] *Ibid.*,hlm. 182.
[47] J. Prins, *Hukum Perkawinan Di Indonesia,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 18-20.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dari sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rancangan tersebut sepertinya tidak bepeluang untuk dibicarakan. Para anggota Partai Islam mengadakan perlawanan, terutama terhadap asas monogami yang dikandung dalam Rancangan tersebut. Sudah barang tentu sebagai organisasi kaum perempuan memprotes argumentasi yang dipergunakan untuk membenarkan poligami. (Supriadi, 2002: 196-197)

Dibentuknya kebijakan mengenai Perkawinan memiliki proses yang tidak mudah, dikarenakan membutuhkan waktu yang lama. Dikarenakan hal tersebut didasarkan kepada pandangan masyarakat disebabkan hal tersebut dibutuhkan untuk penyempurnaan suatu aturan perkawinan. Dimana yang akan menjalankannya juga masyarakat sehingga aspirasi ini snagtalah penting dalam pembentukan suatu peraturan.

Menurut Satjipto Rahardjo, berpendapat jika hukum merupakan sebagai alat pengatur dalam masyarakat maka peraturan perkawinan jika dihubungkan pelaksanaan dari fungsi hukum tersebut maka pastinya tidalah sesuai, dikarenakan jika hanya melihat dari adanya keberadaan social dan spiritual kemasyarakatan maka hal tersebut sangatlah tidak seimbang lagi dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.[48]

Setiap peraturan yang dibuat dan disahkan pastinya memiliki peranan bagi setiap pembangunan nasional. Begitu pula terhadap peraturan perkawinan, dimana peraturan ini dapat menjadi pedoman bagi setiap orang dalam hal pengaturan hukum keluarga. Meskipun ketentuan yang ada dalam

[48] Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia Dan Belanda*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 192.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

peraturan perkawinan belumlah dapat dijalankan seutuhnya oleh masyarakat, tetapi dnegan adanya ketentuan tersebut sudah dapat menjadi pedoman bagi sebagian masyarakat terutama dalam melakukan perkawinan.

2. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas monogami, yaitu seorang pria hanya mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya mempunyai seorang suami. Namun demikian hanya apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan, seorang pria dimungkinkan beristri lebih dari seorang apabila ajaran agama yang dianutnya mengizinkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Jika diperhatikan dari semua aturan yang mengatur tentang perkawinan, maka hampir memiliki kesamaan mengartikan bahwasanya perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap orang untuk mendapatkan pasangan sesuatu dengan ketentuan yang berlaku.

Kemudian Ahmad Azhar Basyir juga berpendapat mengenai pengertian perkawinan, dimana beliau menyatakan perkawinan dengan sebutan “nikah”. Dimana maknannya yaitu:

“Melakukan suatu akad atau perjanjian untuk menghalalkan hubungan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah".[49]

Dilihat dari aspek hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang memiliki beberapa unsur, antara lain:

1. "Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak;
2. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan tersebut berdasarkan ketentuan yang ada dalam hukum-hukumnya;
3. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak".[50]

Pengertian perkawinan menurut "Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan bahwa, perkawinan ialah Pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama". Sehingga jika diperhatikan dari kandungan pengertian tersebut, maka perkawinan dilihat dari adanya hubungan keperdataan, dimana yang menentukan ialah adanya keharusan untuk memenuhi suatu syarat dengan tidak memperhatikan kepercayaan yang dianut oleh setiap pasangan. Sehingga terlihat ada pengenyampingan suatu ketentuan yaitu ketentuan agama Perkawinan hanya menjadi suatu lambang pengesahan dari Negara yang dilaksanakan oleh pejabat yang memiliki kewenangan di bidang

[49] Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia,* Sumur Bandung, Bandung, 2000, hlm. 7.
[50] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan,* Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 10.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perkawinan.[51]

Namun hal tersebut sangatlah berbeda dengan ketentuan perkawinan yang sudah berlaku secara umum di Negara Indonesia. Dimana menurut "Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa perkawinan ditentukan atau dilaksnaakan sesuai dengan agama yang menjadi kepercayaan setiap pasangan.

Selanjutnya jika dilihat dari ketentuan agama islam, yaitu "Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan gahlizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".

Pernyataan tersebut yang menyatakan akad menjadi unsure yang penting terjadinya suatu perkawinan atau pernikahan. Namun akad tersebut bukanlah sebagai ikatan yang berbentuk persyaratan. Dikarenakan perkawinan yang dilakukan dalam agama islam merupakan suatu ibadah yang wajib dilakukan.[52]

3. Tujuan Perkawinan

Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum artinya perkawinan itu

[51] R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* Intermasa, Jakarta, 2011, hlm. 11.
[52] Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,* Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 40.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

membawa dampak secara hukum yaitu melahirkan kepentingan bagi setiap pasangan yang menjalankannya. Kepentingan tersebut meliputi bagi pria dan wanita. Perkawinan, secara hukum tidak hanya membawa dampak hak dan kewajiban melainkan juga secara administrasi memberi tugas dan wewenang kepada negara untuk memasuki arena atau wilayah pribadi seseorang, seperti penentuan keabsahan, status hukum masing-masing pihak termasuk hubungan hukum dengan pihak ketiga misalnya antara menantu dengan mertua.[53]

Dikarenakan Indonesia memiliki kepercayaan yang berbeda-beda, oleh sebab itu pastilah memiliki tujuan yang berbeda juga untuk memaknai suatu perkawinan. Khusus bagi agam islam maka perkawinan bertujuan untuk menjalankan agama untuk dijadikan sebagai bentuk ibadah dan demi memperoleh keturunan dan menjauhi dari adanya perbuatan zina.

4. Syarat Perkawinan

Berdasarkan pemahaman yang ada pada ketentuan aturan perkawinan maka Indonesia menggunakan asas monogami dalam sistem perkawinan. Dimana seorang pria dibatasi memiliki seorang istri sama halnya dengan seorang wanita hanya bisa memiliki seorang suami. Namun hal tersbeut dapat dikesampingkan apabila mengajukan permohonan izin untuk menikah lagi kepada pengadilan.[54]

Berikut dapat dilihat yang menjadi syarat dalam menurut "Pasal 6

[53] Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat Di Indonesia (Sistem kekerabatan, Perkawinan dan Pewarisan Menurut Hukum Adat,*: LaksBang Presindo, Yogyakarta, 2015, hlm. 29.
[54] Budi Susilo, *Gugatan Cerai,*Pustaka Yustisia, Jakarta, 2007, hlm. 11.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sampai Pasal 11 Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang perkawinan", yaitu:

1. "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/ walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
3. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpanganharus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita".

5. Unsur-Unsur Perkawinan

Beberapa unsur-unsur perkawinan adalah sebagai berikut :

a. Unsur Agama/Kepercayaan

Unsur ini secara tegas diatur dalam aturan perkawinan dimana penegasannya dalam dilihat pada "Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan perkawinan harus didasarkan kepada ketuhanan yang maha esa". Kemudian juga terdapat pada "Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing", selanjutnya juga adala pelarangan bagi setiap apsangan yang akan melangsungkan perkawinan yang memiliki kepercayaan yang berbeda yaitu pada "Pasal 8 huruf (f) dijelaskan bahwa 2 (dua) orang yang berbeda agama dilarang untuk melakukan perkawinan". Sehingga dari penegasan aturan tersebut menyatakan bahwa kepercayaan akan suatu keagaman sangat penting didalam pelaksanaannya, dengan demikian

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tidak seorang pun dapat melakukan perkawinan dengan sesuka hatinya.

b. Unsur Biologis

Unsur ini menajdi pelengkap untuk dilakukannya suatu perkawinan dimana berdasarkan "Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa: ketidakmampuan isteri untuk melahirkan keturunan dapat dijadikan alasan bagi seorang suami untuk menikah lagi". Selanjutnya untuk memnuhi unsur ini untuk melaksanakan perkawinan maka haruslah memenuhi batasan usia setiap apsangan yaitu sebagaimana disebutkan "Pasal 7 ayat (2) menyatakan: Untuk melakukan perkawinan seorang pria minimal berumur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan bagi wanita minimal berumur 16 (enam belas) tahun".

c. Unsur Sosiologis

Tujuan dilaksanakannya suatu perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan. Selain itu juga untuk menghindari adanya perkawinan yang tidak sesuai dengan usia maka aturan perkawinan dengan tegas juga mengatur batasan umum yang layak untuk melangsungkan perkawinan. Batasan ini bertujuan agar tidak terjadi permasalahan bagi setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan, serta pasangan yang akan menikah pada usia yang tidak sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan dipahami belumlah memiliki pemikiran yang matang untuk menjalankan kehidupan berkeluarga. Dikarenakan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perkawinan bukanlah bentuk perbuatan hukum yang dibuat sebagai permainan.

d. Unsur Yuridis

Setiap perkawinan sudah selayaknya didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku dikarenakan perkawinan termasuk kedalam suatu perbuatan hukum, oleh sebab itu perkawinan wajib untuk dilaksanakan menurut aturan hukum yang berlaku. Jika perkawinan tidak dilaksanakan sebagaimana unsur ini maka perkawinan dapat dinyatakan tidaklah sah menurut hukum.

e. Unsur Hukum Adat

Hukum adat merupakan aturan yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan Sehingga jika dihubungan dengan "Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Jadi dapat dikatakan bahwasanya perkawinan didasarkan kepada agama dan kepercayaan, maka barulah perkawinan dapat dikatakan sah. Sehingga perkawinan tidak dapat terpisahkan dari dua unsur ini.

C. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan hanya dapat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dilakukan dalam hal-hal yang sangat terpaksa. Perceraian hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sangat terpaksa. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundangan.[55] Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian. Sedangkan talak adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Menurut Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu di antara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami dan juga untuk kepastian hukum maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.[56]

Perceraian menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah putusnya perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi perceraian adalah putusnya

[55] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 351.
[56] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*,:Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 19.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ikatan lahir batin antara suami dan siteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. (Syaifuddin, Turatmiyah & Annalisa, 2014: 18) Menurut kamus hukum, cerai adalah pisah yang berarti putusa hubungan sebagai suami isteri. Jadi perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah yang dimohonkan ke pengadilan berdasarkan syarat yang ditentukan dalam undang-undang.

Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang ditempatkan pada Bab VIII dimana Pasal 38 menentukan: Perkawinan dapat putus karena: Kematian, Perceraian, dan Atas keputusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena perceraian bukanlah suatu hal yang mutlak terjadi karena dapat diatasi agar tidak terjadi perceraian. Penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.

Perceraian hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah ada hubungan suami-isteri (hubungan perkawinan) sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Untuk memberikan pengertian yang lebih bulat lagi, perlu pula dikemukakan pengertian Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai bahan perbandingan, yakni:

"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Dengan melihat perumusan Pasal tersebut, akan bertambah lagi pemahaman mengenai perceraian, yang memiliki makna yang saling bertentangan, yaitu perceraian merupakan suatu pengecualian terhadap prinsip perkawinan yang kekal yang diakui oleh semua agama.[57] Dari uraian di atas, dapat diidentifikasikan beberapa hal mengenai perceraian, yakni :

a. Perceraian adalah salah satu peristiwa yang menyebabkan putusnya perkawinan;
b. Perceraian memiliki akibat-akibat hukum tertentu bagi masing-masing pihak;
c. Perceraian merupakan pengecualian terhadap prinsip perkawinan yang kekal yang diakui oleh semua agama.

Menurut Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang. Sementara pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan begitu pula di dalam penjelasan serta peraturan pelaksananya. Beberapa sarjana juga memberikan rumusan atau defenisi dari perceraian, antara lain :

a. Menurut Subekti sebagai berikut

   Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.

[57] T. Jafizham, *Persentuhan Hukum Di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam,* Mestika, Jakarta, 2006, hlm. 54.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin sebagai berikut :

> Perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari isteri untuk pemutusa perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan isteri.

c. Menurut P.N.H. Simanjuntak sebagai berikut:

> Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.

d. Menurut Soemiyati sebagai berikut :

> Menurut hukum Islam talak mempunyai dua arti yaitu talak dalam arti umum adalah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggal salah seorang suami atau isteri, sementara dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.

Menurut Subekti Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Jadi dengan adanya perceraian maka perkawinan suami dan istri menjadi hapus. Lebih lanjut menurut Soemiyati menjelaskan bahwa perceraian walaupun diperbolehkan tetapi agama islam tetap memandang bahwa perceraian adalah suatu yang bertentangan dengan asas-asas hukum islam.

2. Asas-Asas Hukum Perceraian

a) Pengertian Asas Hukum

Secara internal dalam sistem hukum perkawinan termasuk susbsistem perceraian adalah merupakan asas hukum. Menurut Mahadi,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kata asas atau prinsip adalah sesuatu tempat untuk menyandarkan untuk mengembalikan sesuatu hal yang hendak dijelaskan. Dalam arti tersebut, kata prinsip dipahamkan sebagai sumber yang abadi dan tetap dari banyak hal, aturan atau dasar bagi tindakan seseorang, suatu pernyataan (hukum, aturan, kebenaran) yang dipergunakan sebagai dasar untuk menjelaskan sesuatu peristiwa.[58]

Peter Mahmud Marzuki menegaskan asas-asas hukum dapat saja timbul dari pandangan akan kepantasan dalam pergaulan sosial, yang kemudian diadopsi oleh pembuat undang-undang, sehingga menjadi aturan hukum.[59] Sedangkan Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa asas hukum bukanlah hukum, melainkan pikiran dasar yang masih umum sifatnya.

Memperhatikan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa asas hukum adalah sebagai berikut:

> "a) Refleksi dari kandungan nilai-nilai moral dan tuntutan etis dalam semangat kebenaran dan keadilan yang mengkarakteristik hukum itu hidup, tumbuh dna berkembang dalam ranah kemasyarakatan.
> b) Dasar dan tumpuan yang luas, abstrak dan umum tetapi esensial bagi aturan hukum positif untuk mengatur perbuatan atau peristiwa hukum yang konkret.
> c) Alasan-alasan pembenar hukum yang rasional bagi bentuk isi, sifat dan tujuan norma-norma dalam aturan hukum positif yang diterapkan dalam praktik".[60]

[58] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Op.,Cit.*,hlm. 27.
[59] *Ibid*, hlm. 28.
[60] *Ibid*, hlm. 29-30.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b) Asas-Asas Hukum Khusus Perceraian

Adapun asas-asas hukum perceraian dapat diketahui sebagai berikut:

(1) Asas Mempersukar Proses Hukum Perceraian

Asas mempersukar proses hukum perceraian diciptakan sehubungan dengan tujuan perkawinan. Hakikat tujuan perkawinan yaitu untuk memenuhi tuntutan hajat dan tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam agama yang dianut oleh laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan tersebut.

(2) Asas Kepastian Pranata dan Kelembagaan Hukum Perceraian

Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian mengandung tujuan yang meletakkan peraturan perundang-undangan sebagai pranata hukum dan pengadilan sebagai lembaga hukum yang dilibatkan dalam proses hukum perceraian.

(3) Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian

Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian diciptakan dengan tujuan hukum

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perkawinan untuk melindungi istri (wanita) dari kesewenang-wenangan suami dan mengangkat marwah sebagai mahkluk ciptaan tuhan yang maha kuasa, sehingga sederajat dengan suami".[61]

3. Alasan-Alasan Perceraian

"Undang-Undang tidak membolehkan perceraian dengan dasar permufakatan atau persetujuan semata antara suami dan isteri, tetapi harus ada alasan yang sah. Dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menyebutkan beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian", yaitu:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun dan hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selain itu, ketentuan dalam Pasal 116 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

[61] *Ibid*, hlm. 46

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menyebutkan alasan lainnya yang dapat dijadikan dasar bagi perceraian, yakni :

a. Suami melanggar taklik talak
b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah didepan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang. Perceraian adalah suatu pintu darurat dalam suatu perkawinan. Perceraian berarti gagalnya mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal yang diridhoi tuhan yang maha esa. Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang putusnya perkawinan yaitu pada Pasal 114 Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam berbunyi: putusnya perkawinan yang disebabakan karena perceraian dapat terjadi karena masalah atau berdasarkan gugatan perceraian.

Menurut Pasal 199 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa alasan-alasan putusnya perkawinan antara lain karena:

a. Kematian,

   Putusnya perkawinan karena kematian, maksudnya sudah jelas, yaitu salah satu pihak meninggal dunia, dan menurut ajaran agama kristen, hanya kematian yang dapat memutuskan perkawinan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Kepergian suami atau isteri selama 10 tahun dan diikuti dengan perkawinan baru dengan ornag lain, (Karena keadaan tak hadir (pasal 493 sampai 495 KUHPerdata)

Putusnya perkawinan karena keadaan tak hadir apabila jika salah satu pihak pergi selama sepuluh tahun, maka pihak yang lain dapat melangsungkan perkawinanya yang baru dengan orang lain dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum perkawinan. Dengan terjadinya perkawinan yang baru itu, maka putuslah perkawinannya yang lama.

Sebab ini belum sah dan belum dapat dipakai sebagai alasan kalau belum diadakan penggilan lebih dahulu, misalnya panggilan dalam surat kabar, majalah dan sebagainya. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 493 dan pasal 495 KUHPerdata yang menyatakan sebagai berikut:

> Apabila, selain terjadinya meninggalkan tempat tinggal dengan sengaja, seorang diantara suami isteri selama genap sepuluh tahun telah tak hadir di tempat tinggalnya, sedangkan kabar tentang hidup matinya pun tak pernah diperolehnya, maka si isteri atau suami yang ditinggalkanya, demi izin pengadilan negeri tempat tinggal suami isteri bersama, berhak memanggil si tak hadir tadi dengan tiga kali panggilan umum berturut-turut dengan cara seperti teratur dalam pasal 467 dan 468. Apabila setelah pemberian izin, namun sebelum perkawinan berlangsung, si tak hadir kiranya pulang kembali, atau seorang lain datang membuktikan tentang masih hidupnya, maka izin yang telah diberikan, demi hukum tak berlaku lagi. Apabila si yang ditinggalkan telah kawin dengan orang lain, si tak hadir pada pihaknya, berhak juga kawin dengan orang lain. (pasal 495).

c. Putusan hakim setelah adanya perpisahan meja makan dan tempat tidur selama 5 tahun

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpisahan meja dan tempat tidur adalah perpisahan antara suami dan isteri yang tidak mengakhiri pernikahannya. Akibat pisah meja dan ranjang ini adalah meniadakan kewajiban bagi suami isteri untuk tinggal bersama. Alasan-alasan suami isteri mengajukan permohonan perpisahan meja dan tempat tidur antara lain:

1). Semua alasan untuk perceraian, seperti zinah ditinggalkan dengan sengaja, penghukuman, penganiayaan berat, cacat badan/penyakit pada salah satu pihak antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan. Pasal 233 ayat 1 KUH Perdata menjelaskan bahwa: Dalam hal adanya peristiwa-peristiwa yang dapat digunakan sebagai alasan untuk menuntut perceraian perkawinan, suami isteri adalah berhak, menuntut meja dan ranjang.
2). Berdasarkan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas, penganiayaan dan penghinaan kasar, yang dilakukan oleh pihak yang satu terhadap pihak yang lain. pasal 233 ayat 2 KUH Perdata menjelaskan bahwa : Tuntutan untuk perpisahan yang demikian boleh juga dimajukan berdasar atas perbuatan-perbuatan yang melampaui batas, penganiayaan dan penghinaan kasar, dilakukan oleh pihak yang satu terhadap pihak yang lain.

Pengajuan permohonan, pemeriksaan dan pemutusan hakim terhadap perpisahan meja dan ranjang sama dengan pengajuan permohonan dalam perceraian (pasal 234 KUH Perdata). Keputusan perpisahan meja dan ranjang ini harus diumumkan dalam berita Negara. Selama pengumuman itu belum berlangsung, keputusan tidak berlaku bagi pihak ketiga (pasal 245 KUH Perdata). Setelah mendengar dari keluarga suami dan isteri dan keputusan pisah meja dan ranjang diucapkan oleh hakim,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

maka ditempatkanlah siapa dari kedua orang itu yang akan menjalankan kekuasaan orang tua. Penetapan ini berlaku setelah keputusan perpisahan meja dan ranjang mempunyai kekuatan hukum (pasal 246 KUH Perdata).

Akibat dari perpisahan meja dan ranjang antara lain:

1. Suami isteri dapat meminta pengakhiran pernikahan di muka pengadilan, apabila perpisahan meja dan tempat tidur diantara mereka telah berjalan 5 tahun dengan tanpa adanya perdamaian (pasal 200 KUH Perdata),
2. Pembebasan dari kewajiban bertempat tinggal bersama (pasal 242 KUH Perdata),
3. Berakhirnya harta kekayaan (pasa 243 KUH Perdata),
4. Berakhirnya kewenangan suami untuk mengurus harta kekayaan isteri (pasal 244 KUH Perdata).

Jika terjadi perdamaian antara suami isteri, maka perpisahan meja dan ranjang ini demi hukum menjadi batal dan semua akibat dari perkawinan antara suami isteri hidup kembali, namun semua perbuatan perdata dengan pihak ketiga selama perpisahan tetap berlaku. Pasal 284 KUH Perdata menjelaskan bahwa : Perpisahan meja dan ranjang demi hukum menjadi batal, karena perdamaian suami isteri dan hiduplah kembali karenanya segala akibat perkawinan, sementara itu dengan tak mengurangi akan terus berlakunya perbuatan-perbuatan perdata terhadap pihak ketiga, yang dilakukan kiranya dalam tenggang antara perpisahan dan perdamaian.

d. Perceraian.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perceraian artinya diputuskannya perkawinan itu oleh hakim, karena suatu sebab yang tertentu. Perceraian atas persetujuan suami/isteri tidak diperkenankan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 208 KUH Perdata yaitu: Perceraian suatu perkawinan sekali-kali tak dapat dicapai dengan suatu persetujuan antara kedua belah pihak. Terhadap Ketentuan ini sering dilakukan penyalahgunaan sebagaimana diuraikan di bawah. "Alasan-alasan yang dipakai supaya permintaan perceraian berhasil adalah:

(1) Zina

Perlu diketahui bahwa zinah menurut BW berlainan atau berbeda dengan zina menurut hukum islam. Definisi dari zina menurut BW adalah hubungan kelamin dengan orang lain dari pada suaminnya atau isterinya. Jadi menurut BW orang yang tidak menikah dan tidak mempunyai suami atau isteri tidak berzina, bila ia mengadakan hubungan kelamin dengan seseorang, yang tidak menikah.

(2) Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat,

Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat. Disini harus dipenuhi 2 buah syarat:

1. *Kwaadwillige verlating*,

Kwaadwillige verlating: keadaan meninggalkannya itu harus kwaadwilling artinya salah satu pihak harus menolak (tanpa alasan yang sah) untuk hidup bersama.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Jika umpamanya seorang suami menolak menerima isterinya dalam rumahnya maka dalam hal yang demikian bukan suami yang kemudian berhak mengajukan gugutan berdasarkan kwaadwillige verlating, tetapi pihak isteri. Begitu juga bilamana seorang suami dengan sengaja memilih (sebuah) rumah sedemikian rupa sehingga tidak diharapkan dari pihak isteri untuk bertempat tinggal di situ maka juga dalam hal yang demikian itu suami dianggap menghalang-halangi kewajiban hidup bersama itu.[62]

2. Sudah 5 tahun berturut-turut berpisah.

   Meninggalkan tempat tinggal dengan itikad jahat adalah sebagaimana diuraikan berikut: meninggalkan tempat tinggal dan tetap menolak kembali ketempat kediaman bersama tanpa alasan cukup selama 5 tahun. Jangka waktu 5 tahun berlaku mulai dari saat meninggalkan tempat tinggal bersama atau dari saat sseorang semula meninggalkan tempat tinggal bersama dengan alasan sah dan alasan itu sudah berakhir.

(3) Mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih dalam suatu keputusan hakim yang diucapkan selama pernikahan

Mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih dalam suatu

[62] Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga,* : Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm. 113-114.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

keputusan hakim yang diucakan selama pernikahan. Maksud dari pembuat Undang-Undang ini adalah seorang tidak wajib tetap terikat dengan seorang kriminal atau penjahat yang telah di adili. Sutau keputusan hukuman yang diambil diluar negeri juga dapat dipakai sebagai alasan permohonan perceraian.

(4) Melukai berat atau menganiaya, yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, dengan demikian sehingga membahayakan jiwa korban atau sehingga korban memperoleh luka-luka yang membahayakan,

Jika meneliti ketentuan Undang-Undang ini, maka bukan alasan untuk meminta perceraian seperti, memukul anak berkali-kali, walaupun pukulan itu membahayan, mabuk terus menerus serta merusak barang-barang, dan suatu percobaan membunuh isteri atau suami.

(5) Keretakan yang tidak dapat dipulihkan (yurisprudensi)

4. Akibat Perceraian

Putusnya perkawinan suami isteri membawa konsekuensi sebagai berikut:

1. Kewajiban suami isteri memberikan tunjangan nafkah kepada suami atau isteri yang menang dalam tuntutan perceraian (222 KUHPerdata). Kewajiban memberikan tunjangan nafkah ini berakhir dengan meninggalnya si suami atau si isteri (Pasal 227 KUH Perdata).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Pengadilan menetapkan siapa dari kedua orang tua itu yang akan melakukan perwalian terhadap anak-anak mereka (Pasal 229 KUH Perdata).
3. Apabila suami isteri yang telah bercerai hendak melakukan kawin ulang, maka demi hukum segala akibat perkawinan pertama hidup kembali, seolah-olah tak ada perceraian (Pasal 232 KUH Perdata).[63]

Menurut Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu" sebagai berikut:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya,
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataaan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut,
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri"

D.Tinjauan Umum Tentang Nafkah Iddah dan Anak

Secara etimologi kata "Nafkah" berasal dari bahasa Arab النفقة artinya yaitu biaya, belanja, pengeluaran uang.[64] Bila seseorang dikatakan memberikan *Nafaqah* membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit berkurang karena telah dilenyapkan untuk kepentingan orang lain. Namun apabila kata *Nafaqah* ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti: "Sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga

[63] *Ibid*,. hlm. 11.
[64] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al Munawwir Arab-Indonesia*, Pustaka Progresif, Surabaya, 2002, hlm. 1449.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menyebabkan hartanya menjadi berkurang".[65]

Nafkah istri termasuk kewajiban suami terhadap istrinya memberi nafkah, maksudnya ialah menyediakan segala keperluan istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, mencarikan pembantu dan obat-obatan, apabila suaminya kaya. Dengan demikian nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.

Dalam Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, nafkah adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup, dintaranya sandang, pangan, dan papan.[66]

Apabila telah sah dan sempurna suatu akad perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka sejak itu menjadi tetaplah kedudukan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri, dan sejak saat itu pula suami memperoleh hak-hak tertentu beserta kewajiban-kewajiban sebaliknya istri memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Dengan adanya hak dan kewajiban yang sama-sama dipikul oleh suami dan istri, mereka tidak boleh menyalahgunakan haknya masing-masing dan wajib melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya.

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada Istri terdapat dalam AlQur'an Surah Al-Baqarah ayat 233 dan Al-Hadist. Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk pakaian, makanan, perbelanjaan, keperluan rumah tangga lainnya adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban

[65] Moh. Afifi, Abdul Aziz,, *Fiqih Imam Syafi'i 3,* PT. Niaga Swadaya, Jakarta, 2010, hlm. 41
[66] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern,* Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 75

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.[67]

Iddah jama'nya adalah '*iddad'* yang secara arti kata berarti "menghitung" atau "hitungan" sebab iddah pada hakikatnya adalah bilangan dan hitungan, baik bilangan haid atau suci atau bilangan bulan. Secara etimologis iddah berarti nama bagi suatu masa bagi seorang wanita menunggu untuk Perkawinan selanjutnya setelah wafat suaminya atau karena perpisahan (Perceraian) dengan Suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berpikir bagi Suami.[68] Berikut macam-macam *iddah:*

1. Iddah talak

   Iddah talak artinya iddah yang terjadi karena perceraian. Perempuan yang berada dalam iddah talak antara lain:

   a. Perempuan yang telah dicampuri dan belum putus dalam haid.
   b. Iddah bagi istri yang ditalak dan sudah tidak menjalani masa haid lagi (*monopause*) juga tiga bulan.

2. Iddah hamil

   Iddah hamil yaitu iddah yang terjadi apabila perempuan yang diceraikan itu sedang hamil. Iddah mereka adalah sampai melahirkan anak.

3. Iddah wafat

   Iddah wafat yaitu iddah yang terjadi apabila seorang perempuan ditinggal mati suaminya.

[67] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam, Op.,Cit., hlm.* 165
[68] Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam,* Pustaka Setia, Bandung , 2000, hlm. 193

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Iddah wanita yang kehilangan suami.

   Bila ada perempuan yang kehilangan suami, dan tidak diketahui dimana suaminya itu berada, apakah ia telah mati atau masih hidup, maka wajiblah ia menunggu empat tahun lamanya. Sesudah itu hendaklah ia beriddah pula empat bulan sepuluh hari.[69]

Nafkah *Iddah* sama juga berarti nafkah yang diberikan oleh mantan suami setelah terjadinya perceraian. Sehingga yang dimaksud dengan nafkah *Iddah* atau nafkah cerai adalah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada mantan istrinya berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka. Dapat diketahui bahwa filosofi dengan adanya nafkah iddah setelah terjadinya perceraian yaitu, untuk memberikan kesempatan kepada suami untuk rujuk kembali dalam masa tunggu tersebut, kemudian untuk mengetahui keadan istri sedang hamil atau tidak dalam masa tunggu.

Menurut Soemiyati jika terjadi perceraian dimana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah ibu, atau nenek seterusnya ke atas. Akan tetapi, mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu, termasuk biaya pendidikannya adalah menjadi tanggung jawab ayahnya. Berakhirnya masa asuhan adalah pada waktu anak itu sudah dapat ditanya kepada siapa dia akan terus ikut. Kalau anak tersebut memilih ibunya, maka si ibu tetap berhak mengasuh anak itu, kalau anak itu memilih ikut bapaknya, maka hak mengasuh ikut pindah pada bapak.

Hak- hak anak yang dilindungi oleh pasal 41 huruf a UU No 1

[69] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munkahat*, CV Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm. 122

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tahun 1974 dijelaskan secara lebih mendalam oleh Sudarsono (1994 : 188) hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari kedua orang tuanya. Baik ibu atau bapak si-anak berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak yang mereka peroleh selama pernikahan. Ketika bercerai antara suami istri akan ada status baru, yaitu janda (bagi Istri) dan duda (bagi suami) serta ada istilah mantan/ bekas istri dan mantan/ bekas suami, tetapi istilah ini tidak berlaku untuk anak dan orang tua. Tidak ada istilah mantan anak atau mantan orang tua.Untuk itu, perceraian terjadi status anak dan orang tua tidak akan berubah untuk memelihara dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Hak untuk dipelihara ini lebih mengacu kepada pemenuhan kebutuhan secara lahiriah, anak berhak untuk mendapatkan pemeliharaan anggota jasmaninya dari kedua orang tuanya. Peran kedua orang tua dalam menjaga anak mereka dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang merupakan kebutuhan primer hingga jika memungkinkan pemenuhan kebutuhan tertier.

Sedangkan hak untuk mendapatkan pendidikan ini lebih mengacu kepada pembinaan kejiwaan atau rohaniah si anak, pemenuhan kebutuhan ini dapat berupa memberikan pendidikan atau pengajaran ilmu pengetahuan yang terdapat di jenjang sekolah, pendidikan agama, pendidikan kepribadian dan berbagai pendidikan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan dari kejiwaan si anak. Baik pemeliharaan maupun pendidikan, keduanya harus mendapatkan perhatian serius oleh kedua orang tua si

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

anak, walaupun disaat putusan cerai di bacakan oleh hakim di depan sidang pengadilan menjatuhkan hak asuh kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak yang tidak diberikan hak asuh tersebut dapat lepas bebas tanpa tanggung jawab. Keduanya tetap bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Penyelesaian Sengketa Nafkah Iddah Dan Nafkah Anak Pada Pengadilan Agama Pekanbaru

Putusnya ikatan perkawinan tidak serta merta putus juga kewajiban suami untuk tetap menafkahi bekas istri dan anak sampai batas tertentu. Dalam peraturan dan ketentuan hukum islam juga mengatur masalah nafkah akibat perceraian. Berkaitan dengan hal ini, Majelis Hakim mempunyai peran yang sangat penting dalam memutuskan masalah perceraian, hal itu sesuai dengan Pasal 39 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Menurut Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu di antara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami dan juga untuk kepastian hukum maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.[70]

[70] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Op.,Cit.*,hlm. 9.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Putusnya hubungan pernikahan pada dasarnya diakibatkan oleh adanya perceraian, baik cerai kerena kematian maupun karena cerai hidup melalui 2 cara yakni:

1. Cerai Talak, yaitu cerai khusus bagi yang beragama islam, dimana suami (pemohon) mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada istri. Berdasarkan agama islam, cerai dapat dilakukan oleh suami dengan mengikrarkan talak kepada istri, namun agar sah secara hukum suami mengajukan permohonan menjatuhkan ikrar talak terhadap termohon di hadapan Pengadilan Agama.
2. Cerai Gugat, yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh istri (Penggugat) terhadap suami (tergugat) kepada Pengadilan Agama dan berlaku pula pengajuan gugatan terahdap suami oleh istri yang beragama islam di Pengadilan Negeri. Cerai gugat inilah yang mendominasi jenis perceraian.

Ketika terjadi perceraian dan masa iddah sudah selesai, wanita yang dulunya menjadi istri kini berubah status menjadi mantan istri. Tali pernikahan sudah putus, bukan lagi suami istri. Sehingga dia tidak wajib dinafkahi oleh mantan suaminya. Namun hak nafkah bagi anak tidak akan putus sehingga ayah berkewajiban menanggung semua kebutuhan anak, sekalipun anak tinggal bersama mantan istri.

Seorang mantan suami memiliki kewajiban untuk memberi nafkah anak menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (telah berusia 21 tahun). Hal tersebut ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menurut Pasal 149 huruf d jo Pasal 156 huruf d KHI berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang menyatakan bahwa:

> "Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21) tahun"

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sebuah rumah tangga yang mengalami perceraian sudah dapat dipastikan akan menimbulkan beberapa akibat yang merugikan semua pihak tanpa terkecuali. Dalam hal ini tentunya akan membawa akibat hukum terhadap anak. Kelahiran anak sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan hukum akan membawa konsekuensi hukum, berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara orangtua dengan anaknya. Artinya anak mempunyai hak tertentu yang harus dipenuhi oleh orang tuanya sebagai kewajibannya dan sebaliknya orangtua juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh anaknya sebagai kewajibannya.

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di Persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bahkan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di Persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan yang di ucapkan oleh hakim di persidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonis*).

Keharusan memuat pertimbangan yang merupakan dasar dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya merupakan pekerjaan yang berat bagi hakim, sedangkan tidak setiap peristiwa yang ditangani diatur secara jelas dalam aturan tertulis, menimbulkan konsekuensi bahwa hakim harus menemukan hukum yang dapat dijadikan alasan untuk memutuskan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

suatu perkara yang diajukan kepadanya bertujuan agar putusan yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan hakim terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum agar putusan yang dikeluarkan tersebut mempunyai wibawa.[71]

Dalam amar Putusan Nomor 249/Pdt.G/2019/PA.Pbr, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah)
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
3. Nafkah anak untuk dua orang sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau menikah, dengan tambahan 10% setiap tahunnya.

Kemudian amar Putusan Nomor 252/Pdt.G/2019/PA.Pbr, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:

1. Nafkah ketinggalan/lampau sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah)
2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
3. Nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).ditambah 10% setiap tahun untuk mengatasi kenaikan barang.

Selanjutnya amar Putusan Nomor 593/Pdt.G/2020/PA.Pbr, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:

1. Nafkah lalu/Madhya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 2.000.000,-(tiga juta rupiah)

[71] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar,* Liberty, Yogyakarta, 2016, hlm. 15.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
4. Biaya persalinan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
5. Biaya pembelian peralatan bayi sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).

Selanjutnya amar Putusan Nomor 740/Pdt.G/2020/PA.Pbr, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:

1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)
3. Nafkah anak sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak berumur 21 tahun atau sudah menikah dengan kenaikan 15 % setiap tahun.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Fakhriadi Selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pekanbaru menyatakan bahwa pelaksanaan pemberian terhadap nafkah iddah dan anak adalah nafkah iddah diberikan disaat talak dijatuhkan sehingga nafkah ini pasti akan diterima oleh pihak mantan istri sedangkan nafkah anak merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, ketika terjadinya perceraian maka nafkah tersebut menjadi tanggung jawab dari ayah kandungnya sendiri.[72]

Kemudian wawancara penulis dengan Bapak Asfawi selaku Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menyatakan bahwa pelaksanaan pemberian terhadap nafkah iddah dan nafkah anak adalah nafkah iddah sudah jelas dan

[72] Wawancara penulis dengan Bapak Fakhriadi Selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, tanggal 05 februari 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

memiliki ketetapan yaitu diberikan disaat talak dijatuhkan dan nafkah anak merupakan kewajiban penuh yang harus dipenuhi oleh kedua orang tua, tetapi lain kedaaannya apabila di dalam rumah tangga kedua orang tua telah melakukan perceraian, dimana nafkah anak tersebut tetaplah menjadi kewajiban dari ayahnya hingga anak tersebut bisa mandiri mempertanggung jawabkan hidupnya. Tetapi tindakan perceraian yang menghasilkan suatu putusan dimana adanya penetapan nafkah anak bagi ayahnya namun hal ini tidaklah menjadi suatu kepastian si anak akan menerima nafkah tersebut, disebabkan setelah adanya perceraian sebagaian pihak masih ada yang melepaskan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan si anak.[73]

Untuk mengetahui tanggapan Pemohon dan Termohon tentang pelaksanaan pemberian terhadap nafkah iddah dan nafkah anak oleh ayahnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.1
Tanggapan Pemohon dan Termohon Tentang Pelaksanaan Pemberian Terhadap Nafkah Iddah dan Nafkah Anak Oleh Ayahnya

No	Keterangan	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1.	Terlaksana	5	17%
2.	Tidak Terlaksana	25	83%
Jumlah		30	100%

Sumber: Data Olahan Penulis, 2021.

Berdasarkan keterangan tersebut, maka bisa dilihat tentang tujuan pelaksanaan pemberian terhadap nafkah iddah dan nafkah anak oleh ayahnya

[73] Wawancara penulis dengan Bapak Asfawi selaku Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, tanggal 05 februari 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yaitu sebagian besar responden menyatakan tidak terlaksana yaitu sebanyak 25 orang atau 83%, sedangkan sebanyak 5 orang atau 17% responden menyatakan terlaksana. Sehingga dari keterangan tersebut maka bisa dinyatakan nafkah iddah diberikan dan nafkah anak yang menjadi tanggung jawab dari ayahnya masih ada yang tidak dijalankan sebagaimana putusan dari pengadilan.

Berdasarkan amar putusan dan keterangan diatas Pemohon telah melaksanakan amar putusan yang dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru bersamaan dengan pengucapan talak satu raj'i terhadap termohon. Akan tetapi pada nafkah anak dilaksanakan hanya satu bulan pertama saja dan pada bulan selanjutnya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam amar putusan Majelis Hakim.

Talak raj'i yaitu talak yang diizinkan rujuk kembali jika masih dalam masa iddah. Talak raj'i ini berupa talak satu atau talak dua tanpa iwadh (uang pengganti) dari mantan istri. Namun apabila suami melakukan rujuk setelah habis masa iddah maka harus dilakukan akad perkawinan yang baru.

Terkait dengan kasus diatas berarti Pemohon tidak menjalankan amar putusan sebagaimana mestinya, maka hal itu merupakan bentuk pembangkangan atas putusan pengadilan. Terkait hal ini, Pasal 196 HIR menyebutkan bahwa:

> "jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi putusan itu didalam tempo yang ditentukan oleh ketua yang selama-lamanya delapan hari"

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selain itu mantan istri dapat mengajukan permohonan sita eksekusi. Pengadilan tingkat banding tidak diperkenankan melaksanakan eksekusi. Sebelum melaksanakan eksekusi, Ketua Pengadilan Agama terlebih dahulu mengeluarkan penetapan yang ditujukan kepada panitera atau juru sita untuk melaksanakan eksekusi dan pelaksanaan eksekusi tersebut dibawah Pengadilan Agama. Hal ini diatur dalam Pasal 196 HIR mengenai eksekusi untuk menghukum salah satu pihak untuk membayarkan sejumlah uang.

Perceraian (talak) merupakan sebuah aturan hukum yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan pernikahan. Oleh karena itu, ikatan pernikahan dapat putus dengan tata cara yang telah diatur secara benar, baik dalam hukum Islam maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia.[74] Walaupun perceraian merupakan jalan terakhir dan menyebabkan putusnya hubungan antara suami dan isteri, namun bukan berarti tidak ada kewajiban-kewajiban lagi. Melainkan akan melahirkan akibat-akibat hukum yang baru, hal ini bisa dilihat dalam peraturan perundang-undangan dalam Pasal 1 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang menyatakan bahwa peradilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri. Pasal tersebut menunjukkan bahwa antara suami dan isteri masih memiliki hak dan kewajiban apabila sudah terjadi perceraian di antara mereka, yaitu hak isteri adalah mendapatkan nafkah iddah dan suami berkewajiban memberikannya.

[74] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai dengan KHI,* Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 207

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pasal tersebut menunjukkan bahwa kewajiban dari mantan suami untuk memberikan nafkah iddah, mut‟ah, dan nafkah untuk anak-anak. Dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari mantan isteri, maka majelis hakim tetap dapat menghukum mantan suami untuk membayar kepada mantan isteri berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak.

Sedangkan kewajiban dari pihak isteri adalah menjalani masa iddah, yaitu masa-masa bagi seorang perempuan menunggu dan mencegah dirinya untuk melakukan pernikahan setelah dia diceraikan oleh suaminya, baik karena wafatnya sang suami atau setelah suaminya menceraikan dirinya. Hukum iddah ini adalah wajib bagi setiap isteri yang ditalak suaminya, hal ini berdasarkan kepada ketentuan dalam Islam yaitu dalam surat al-Baqarah Ayat 228 yang menegaskan tentang kewajiban menjalankan masa iddah bagi perempuan dan kewajiban suami memberikan nafkah iddah.

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ
اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا
اِصْلَاحًاۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِۖ وَلِلرِّجَالِ
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Artinya : Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Maha bijaksana.

Menurut Imam Syafi'i sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Asnawi perempuan yang telah diceraikan dengan talak raj'i memiliki hak nafkah dan tempat tinggal selama perempuan tersebut masih masa iddah.[75] Muhammad Bagir al-Habsyi sebagaimana yang dikutip oleh Amiur Nuruddin dan Azhri Akmal Tarigan berpendapat bahwa perempuan yang masih masa iddah berhak menerima tempat tinggal dan nafkah, mengingat bahwa statusnya sebagai seorang isteri belum lepas semuanya, karena tetap memiliki sebagian hak-hak sebagai isteri. Kecuali dia dianggap nusyuz (melakukan hal-hal yang dianggap durhaka yaitu melanggar kewajiban taat kepada suaminya), maka ia tidak berhak apa-apa.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Fakhriadi Selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pekanbaru menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan ketika pelaksanaan pemberian terhadap nafkah anak tidak berjalan adalah pada dasarnya pihak pengadilan tidak dapat melakukan suatu tindakan baik secara hukum dikarenakan memang tidak ada ketentuan yang mengatur atau memberikan sanksi kepada salah satu pihak yang tidak menjalankan kewajiban dalam memberikan nafkah anak, sehingga pelaksanaannya tidak bisa semaksimal mungkin terjadi.[76]

Kemudian wawancara penulis dengan Bapak Asfawi selaku Hakim

[75] Ali Yusuf al-Subki, *Fikih Keluarga,* Amzah, Jakarta, 2012, hlm. 358
[76] Wawancara penulis dengan Bapak Fakhriadi Selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, tanggal 05 februari 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pengadilan Agama Pekanbaru menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan ketika pelaksanaan pemberian terhadap nafkah anak tidak berjalan adalah sebagai hakim yang telah menjatuhkan suatu putusan perceraian kepada para pihak baik pemohon maupun termohon, maka atas putusan tersebut sudah ada suatu penegasan akan tanggung jawab yang akan dipikul oleh salah satu pihak yaitu seorang ayah untuk melakukan pemberian atau pemenuhan suatu kewajiban pemberian nafkah anaknya, tetapi hal tersebut masih berada dalam lingkup pengadilan sehingga bisa menjadi suatu tindakan paksaan, namun ketika setelah putusan tersebut jatuh dengan adnaya pemberian talak kepada mantan istri maka pemberian nafkah tersebut tidak bisa lagi menjadi suatu tindakan paksaan oleh pengadilan dan pengadilanpun tidak bsia melakukan pengawasan secara terus menerus.[77]

Untuk mengetahui tanggapan Pemohon dan Termohon tentang tindakan yang dilakukan ketika pelaksanaan pemberian terhadap nafkah anak tidak berjalan dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.2
Tanggapan Pemohon dan Termohon Tentang Tindakan Yang Dilakukan Ketika Pelaksanaan Pemberian Terhadap Nafkah Anak Tidak Berjalan

No	Keterangan	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1.	Mengajukan tuntutan	0	0
2.	Menerima Saja	30	100%
Jumlah		30	100%

Sumber: data olahan Penulis, 2021.

[77] Wawancara penulis dengan Bapak Asfawi selaku Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, tanggal 05 februari 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan keterangan tersebut, maka bisa dilihat tentang tindakan yang dilakukan ketika pelaksanaan pemberian terhadap nafkah anak tidak berjalan yaitu sebagian besar responden menyatakan menerima saja yaitu sebanyak 30 orang atau 100%. Sehingga dari keterangan tersebut maka bisa dinyatakan salah satu dari termohon menyatakan, setelah termohon mencoba untuk melakukan konsultasi dengan salah satu pegawai Pengadilan Agama Pekanbaru yang mana pihak pegawai tersebut menjelaskan bahwa perbuatan Pemohon yang tidak melaksanakan amar putusan tersebut bisa di eksekusi, hanya saja biaya operasional untuk mengurusnya lebih besar dari nafkah anak yang diminta oleh Termohon. Sehingga Termohon memutuskan untuk tidak mengajukan eksekusi melalui Pengadilan Agama Pekanbaru.

Menurut mayoritas ulama kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa alasan mengapa pihak suami diwajibkan menafkahi isterinya adalah karena adanya hubungan timbal balik antara suami isteri *(al-'alaqat al-zawjiyat)* artinya bahwa yang menjadi penyebab wajibnya nafkah karena akibat dari akad pernikahan yang sah yang masing-masing pihak kemudian terikat satu sama lain dengan hak dan kewajiban yang telah diatur oleh hukum agama. Selama masih ada hubungan kerja sama antara suami dengan isteri maka selama itu pula kewajiban untuk memberi nafkah dipikul dipundak suami. Oleh karena dianggap masih ada hubungan suami isteri, maka wanita yang sudah ditalak dengan *talaq raj'i* masih wajib dinafkahi oleh suami. Adapun wanita yang yang ditalak ba'in tidak wajib dinafkahi karena sudah dianggap sama sekali putus hubungan suami isteri terlepas dari masalah apakah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mantan isterinya sedang hamil atau tidak.

Kewajiban bagi suami memberikan nafkah tetap dibebankan atas diri suami untuk isteri selama hal yang menjadi sebab itu dimilikinya. Atas dasar itu suami wajib menafkahi isteri yang sedang dalam masa ‘iddah baik disebabkan cerai talak atau bukan, baik dengan talaq raj‘i maupun talak ba‘in baik dalam keadaan hamil atau tidak. Baik perceraian yang disebabkan alasan yang datang dari suami atau dari isteri selain perceraian yang disebabkan karena isteri melakukan zina. Akan tetapi menurut pendapat Hanafiyah kewajiban nafkah gugur ketika isteri tidak lagi memberikan loyalitasnya kepada suami. *Nusyuz* (keluar dari ketaatan) merupakan salah satu dari penyebab gugurnya hak nafkah bagi isteri.[78]

Perkawinan tidak hanya sekedar hubungan kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunah Rasulullah saw dan mengandung akad yang kokoh (*mitsaqan ghalidhan)* yang merupakan ibadah dalam penyempurnaan agama bagi umat muslim. Pada dasarnya perceraian adalah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah, namun ketika terjadi permasalahan terus menerus diantara suami-istri yang tidak bisa terselesaikan, maka Hukum Islam memperbolehkan dilakukan perceraian sebagai solusi terakhir yang membawa kemaslahatan diantara keduanya. Berakhirnya hubungan suami-istri karena perceraian bukan pula berakhir hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, perceraian mengakibatkan akibat hukum baru diantara mantan suami

[78] Satria Effendi, *Problema Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah)* Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 154

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kepada istri.[79]

Kewajiban mantan suami itulah yang kemudian menjadi hak mantan istri diantaranya adalah hak mut'ah dan hak nafkah iddah. Hak mut'ah dalam bahasa arab berasal dari kata *al-matâ'* yang mempunyai arti sesuatu yang dijadikan objek untuk dinikmati, bersenang-senang dan dimanfaatkan. Secara istilah mut'ah adalah sejumlah harta yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri akibat dari perceraian sebagai penghibur atau ganti rugi. Dasar pemberian mut'ah adalah surat al-Baqarah ayat 241.

وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ

Artinya : Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.

Nafkah Iddah berasal dari dua unsur kata, yaitu nafkah dan iddah. Nafkah adalah harta yang diberikan suami kepada istri dan kerabat baik berupa biaya kehidupan, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya. Iddah secara bahasa berarti menghitung atau hitungan‖, sedangkan secara istilah Iddah adalah suatu masa dimana mantan istri menunggu dan tidak diperbolehkan menikah lagi sebelum masa menunggu selesai. Dari dua pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa nafkah iddah adalah sejumlah harta yang diberikan atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan istri selama dalam masa menunggu, yang mana dalam masa menunggu tersebut istri tidak boleh menikah dengan

[79] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 53

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

laki-laki lain.

Nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan oleh suami kepada isterinya setelah mereka melakukan perceraian. Suami berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada isterinya setelah mereka melakukan perceraian. Hal ini sangat bertentangan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, di mana pada umumnya apabila sudah terjadi perceraian maka dianggap sudah tidak ada hubungan apapun lagi bagi suami isteri, begitu juga halnya dengan nafkah iddah yang seharusnya menjadi kewajiban pihak suami.

Dasar hukum nafkah iddah adalah surat at-Thalaq ayat 1 dan ayat 6.

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍۗ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِۗ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗۗ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا

Artinya: Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَـٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۖ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ (٦)

Artinya: Tempatkanlah mereka [para isteri] di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan [hati] mereka. Dan jika mereka [isteri-isteri yang sudah ditalak] itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan [anak-anak]mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu [segala sesuatu], dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan [anak itu] untuknya

Secara tegas ayat di atas menyebutkan bahwa bekas suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada mantan isterinya apabila mantan isterinya waktu diceraikan dalam keadaan hamil. Begitu juga halnya kewajiban untuk memberikan biaya penyusuan terhadap isterinya tersebut. Nafkah dalam perceraian sendiri sebagaimana yang terdapat dalam tafsir as-Sabuni, bahwa nafkah itu diartikan sebagi mut'ah, yang berarti pemberian seorang suami kepada isterinya yang diceraikan, baik itu berupa uang, pakaian atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan penghormatan kepada isterinya guna menghindari kekejaman talak yang dijatuhkannya.

Perbekalan harta secara tegas telah diberikan al-qur'an bagi mantan isteri yang diceraikan, sehingga mereka tidak menderita sedapat mungkin secara fisik karena penderitaan emosial yang tidak dapat dihindari. Penderitan emosial berusaha dikurangi dengan menganjurkan laki-laki agar melepaskan mereka

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dengan cara yang baik, sangat disayangkan ada kesenjangan yang jauh dari ajaran idealnya dan praktiknya yang terjadi. Sehingga sangat diperlukan untuk menanamkan pendidikan al-qur'an dalam skala yang jauh lebih luas bagi perempuan muslim, sehingga mereka menjadi sadar, atas hak-hak yang akan dicapainya.

Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menguraikan pendapatnya mengenai akibat hukum perceraian terhadap nafkah anak secara lebih rinci, sebagai berikut:

1) Kewajiban membiayai anak tidak hilang karena putusnya perkawinan akibat adanya perceraian.
2) Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah (sampai anak dewasa atau berdiri sendiri, bekerja/mendapat penghasilan atau anak menikah). Kewajiban membiayai tetap menjadi tanggung jawab ayah walaupun pemeliharaan anak tidak padanya. Artinya ayah tetap mempunyai kewajiban untuk membiayai penghidupan anak walaupun hak pemeliharaan anak berada pada ibu, kakek, nenek, bibi, dan sebagainya
3) Bila ayah tidak dapat memberi biaya pemeliharaan (penghidupan), maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya hidup anak
4) Bila ayah tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk membiayai pemeliharaan anak, maka seorang (mantan) istri dapat melakukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama atau

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pengadilan Negeri dimana proses perceraiannya dilakukan. Selanjutnya, Pengadilan akan memanggil (mantan) suami. Jika suami tidak memenuhi surat panggilan dari pengadilan tanpa alasan yang patut, maka Ketua Pengadilan akan mengeluarkan Surat Penetapan yang memerintahkan untuk melakukan eksekusi kepada Panitera atau Juru Sita. Namun, apabila (mantan) suami datang memenuhi panggilan dari Pengadilan, maka Ketua Pengadilan akan mengeluarkan peringatan pengadilan yang ditujukan kepada mantan suami agar memenuhi kewajibannya. Lama waktu peringatan tidak boleh lebih dari 8 hari. Setelah lebih 8 hari, mantan suami tidak melaksanakan/memenuhi putusan Pengadilan, maka akan dikeluarkan surat penetapan oleh Ketua Pengadilan yang memerintahkan eksekusi kepada Panitera atau Juru Sita.

Memperhatikan penjelasan beberapa ahli hukum perceraian sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat dipahami bahwa Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 adalah wujud normatif dari upaya Negara untuk melindungi hak-hak anak setelah terjadi perceraian dari kedua orang tuanya, berlandaskan fungsi Negara hukum mengaku dan melindungi HAM.

Jika suatu pernikahan putus, maka sebagai akibat hukumnya melaksanakan iddah sesuai dengan ketetapan al-Qur‟an dan hadis. Iddah artinya suatu masa yang mengharuskan perempuan-perempuan yang telah cerai dari suaminya, baik cerai mati maupun cerai hidup, untuk menunggu sehingga dapat diyakinkan bahwa rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Bila rahim perempuan itu telah berisi sel yang akan menjadi anak, dalam waktu beriddah itu akan kelihatan tandanya. Itulah sebabnya ia diharuskan menunggu dalam masa yang ditetapkan. Sehingga dengan sebab menunggu tersebut, perempuan berhak mendapatkan nafkah iddah, terlebih dalam masa iddah talak raj'i.[80]

Salah satu bentuk ketentuan hukum yang berhubungan dengan kewajiban ketika pernikahan itu telah berakhir karena perceraian adalah perihal kewajiban mantan suami dalam memberikan nafkah selama masa *'iddah* (nafkah 'iddah) dan *mut'ah*, kepada mantan isterinya serta kewajiban memberikan nafkah kepada anak yang belum mumayyiz dan dalam pengasuhan mantan isterinya (hak *hadhanah*) yang besarannya ditetapkan majelis hakim dalam putusan.

Sebagaimana Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan tentang akibat hukum dari perceraian yang terjadi karena adanya permohonan talak dari suami (Pemohon) adalah mantan suami wajib:

1. Memberikan *mut'ah* (pemberian/hadiah) yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al-dukhul* (belum dicampuri);
2. Memberi nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam *'iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla al-dukhul*;

[80] Ibnu Mas"ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, Pustaka setia, Bandung, 2007, hlm. 372

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Memberikan biaya *hadhanah* (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Fakhriadi Selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pekanbaru menyatakan bahwa akibat hukum perceraian terhadap Nafkah Iddah Dan Nafkah Anak adalah pada dasarnya meskipun telah terjadinya suatu perceraian maka tidak menjadi suatu pemutus pelaksanaan suatu kewajiban yang ada pada setiap pihak, terutama terhadap kewajiban pemberian nafkah anak. Dikarenakan yang putus hanyalah ikatan hubungan perkawinan dengan istri bukan terhadap anak. Sehingga kewajiban itu melekat kapan pun. [81]

Kemudian wawancara penulis dengan Bapak Asfawi selaku Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menyatakan bahwa akibat hukum perceraian terhadap Nafkah Iddah Dan Nafkah Anak adalah jika berhubungan dengan nafkah iddah maka hal ini sudah ditentukan sesuai waktunya namun jika berkaitan dengan nafkah anak maka akibat terjadinya suatu perceraian tidak menjadi suatu pemutus ikatan atau kewajiban ayah kepada anaknya untuk memberikan pembiayaan pemeliharaan dan pendidikan anak hingga dewasa dan mampu mempertanggungjawabkan hidupnya sendiri.[82]

Untuk mengetahui tanggapan Pemohon dan Termohon tentang pengetahuan mengenai akibat hukum tidak dilaksanakannya Nafkah Anak, dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

[81] Wawancara penulis dengan Bapak Fakhriadi Selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, tanggal 05 februari 2021
[82] Wawancara penulis dengan Bapak Asfawi selaku Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, tanggal 05 februari 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel III.3
Tanggapan Pemohon dan Termohon Tentang Pengetahuan Mengenai Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Nafkah Anak

No	Keterangan	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1.	Mengetahui	0	0
2.	Tidak Mengetahui	30	100%
Jumlah		30	100%

Sumber: data olahan Penulis, 2021.

Berdasarkan keterangan tersebut, maka bisa dilihat tentang pengetahuan mengenai akibat hukum tidak dilaksanakannya Nafkah Anak yaitu sebagian besar responden menyatakan tidak mengetahui yaitu sebanyak 30 orang atau 100%. Sehingga dari keterangan tersebut maka bisa dinyatakan memang para pihak tidak mengetahui akibat hukum atas tidak dilaksanakannya pemberian nafkah terhadap anaknya.

Pada dasarnya ada dua cara pelaksanaan pembayaran nafkah mantan istri yang ada di Pengadilan Agama, yaitu dengan cara sukarela, dimana suami melakukan pembayaran nafkah kepada mantan istri tanpa adanya paksaan, dan yang kedua dengan cara paksaan yaitu dengan cara eksekusi.[83] Mengenai nafkah pasca perceraian, pada sistem undang-undang yang mengharuskan masa tunggu setelah perceraian (baik berdasar hukum Islam atau lainnya), laki-laki mempunyai kewajiban menafkahi perempuan selama masa tunggu atau iddah (harta bersama, nafkah mut'ah) tetapi jika perempuan mengambil inisiatif untuk cerai atau dinilai bersalah atau dia terlibat dengan suatu hubungan seksual di luar nikah, maka hak atas nafkah selama masa iddah ini dapat

[83] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Prenada Media, Yogyakarta, 2018, hlm. 314.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

hilang. Hal ini juga terjadi dalam hak mut'ah, posisi istri dalam perceraian sangat berpengaruh dalam pemberian mut'ah. Mut'ah hanya dapat diberikan apabila perempuan juga dinilai tidak bersalah ataupun diceraikan dengan alasan tidak adil.

Tujuan pemberian nafkah sendiri sebagaimana telah dibahas sebelumnya adalah untuk memberikan bantuan dan penghormatan kepada isteri serta menghindarkan dari kekejaman talak yang dijatuhkan oleh suaminya.[30] Dapat dipahami juga bahwa tujuan pemberian nafkah dalam rangkaian menghindarkan kemungkinan kemudaratan setelah terjadinya perceraian, dan diharapkan dengan adanya pemberian nafkah bagi mantan isteri maka akan dapat menimbulkan kemaslahatan bagi mantan isteri tersebut jika tidak mampu mencari nafkah sendiri, dan juga mendatangkan kemudahan kepada mantan isteri tersebut. Terkadang seorang isteri yang ditalak itu miskin dan tidak ada seorang pun yang menanggungnya, maka dari itu suami yang menceraikan itu wajib untuk memberikan nafkah selama masa iddah serta persiapannya untuk kawin dengan suami lain.

Perkawinan dan perceraian adalah perbuatan hukum yang mengakibatkan lahirnya kewajiban dan hak yang harus diatur dengan norma-norma hukum. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan perwujudan dari kehendak umat Islam bangsa Indonesia untuk dijadikan peraturan perundang-undangan dalam bidang perkawinan telah mengatur akan hak masing-masing dalam kehidupan keluarga, baik atas istri maupun suami termasuk hak dan kewajiban

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

suami-istri akibat dari perceraian.[84] Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak dalam perkawinan. Perceraian atas persetujuan suami-isteri tidak di perkenankan. Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan Pengadilan.

Perceraian terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang - Undang Perkawinan) tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan serta penjelasannya secara jelas menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan. Dilihat dari putusnya perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena karena kematian, karena perceraian, dan karena putusan Pengadilan.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa setelah terjadinya perceraian bukan berarti kewajiban suami isteri sebagai ayah dan ibu terhadap anak di bawah umur berakhir. Suami yang menjatuhkan talak pada isterinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak

[84] Amir Syarifudin, *Op.,cit.*,hlm. 97.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut baligh dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri. Baik bekas suami maupun bekas isteri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan isteri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anak.

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anakanak mereka sebaik-baiknya
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Jadi berdasarkan pembahasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa Akibat Hukum Perceraian Terhadap Penyelesaian Sengketa Nafkah Iddah Dan Nafkah Anak Pada Pengadilan Agama Pekanbaru adalah mantan suami memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan istri selama dalam masa menunggu, yang mana dalam masa menunggu tersebut istri tidak boleh menikah, dan sebagai ayah maka memiliki kewajiban kepada anaknya untuk memberikan pembiayaan pemeliharaan dan pendidikan anak hingga dewasa hingga mampu mempertanggungjawabkan hidupnya sendiri. Bila ayah tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk membiayai pemeliharaan anak, maka

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

seorang (mantan) istri dapat melakukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama. Namun sebagaimana yang terjadi banyak mantan suami (ayah) tidak memenuhi kewajibannya, tetapi dikarenakan keterbatasan biaya eksekusi menyebabkan tidak ada satupun mantan istri (ibu) yang mengajukan permohonan eksekusi.

B. Kendala Bagi Mantan Suami Untuk Menjalankan Kewajibannya Dalam Pemberian Nafkah Iddah dan Anak Setelah Putusnya Perkawinan Karena Perceraian

Hukum Islam membolehkan pasangan suami istri untuk melakukan perceraian jika memang perceraian yang dikehendaki pasangan tersebut membawa kebaikan bersama apabila dibandingkan dengan menjalani perkawinan yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Walaupun maksud dari perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, tentulah kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan, karena kebahagiaan itu tidak dapat dipaksakan.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan hak dan kewajiban mantan suami terhadap istri menurut Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 selaras dengan hukum Islam. Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri maka akibat hukumnya adalah kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya untuk memberikan mut'ah yang pantas berupa uang atau barang dan memberikan nafkah baik pakaian dan tempat kediaman selama istri dalam masa iddah, melunasi mas kawin yang masih terhutang, perjanjian ta"lik talak dan perjanjian lain.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Ada beberapa orang yang mungkin salah memperlakukan istrinya dan menyusahkan hidupnya selama masa iddahnya. Setelah menjatuhkan thalaq satu. Hal ini terlarang, suami tetap harus menafkahinya sebagaimana yang dia sediakan untuk dirinya sendiri, sesuai dengan standar hidup si suami. Dalam situasi ini, masih ada harapan untuk berdamai, dan kalaupun tidak, maka perpisahan itu harus dilakukan secara terhormat. Sedangkan bila istri tengah hamil, Al-Quranul Karim membebankan tanggung jawab tambahan. Perceraian sama sekali tidak diperkenankann sampai anak yang dikandungnya lahir. Dengan demikian, dia harus dinafkahi sepatutnya.[85]

Bagi si anak sendiri, maka perawatannya, kesejahteraan serta kediaman bagi ibunya, merupakan tanggung jawab sang ayah. Seandainya si ibu tak dapat menyusuinya, atau timbul keadaan sedemikian rupa yang menghalangi ibu dari meneteki anaknya, maka merupakan tanggung jawab ayah untuk menyerahkan anaknya kepada orang lain agar dirawat/disusui dengan biaya sendiri. Hal ini jangan sampai menyebabkan ayah mengurangi nafkah yang wajar yang berhak diperoleh si ibu sesuai dengan keadaannya.

Pemeliharaan dan penjagaan anak merupakan kewajiban kedua orang tua untuk memelihara, mendidik, membesarkan dan mensejahterakan anak hingga sang anak dapat tumbuh dewasa dan syara' tidak menetapkan batas umur tertentu. Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan akibat putusnya perkawinan ialah Pertama, baik ibu atau ayah berkewajiban memelihara dan mendidik

[85] Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2012,, hlm.124.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya. Kedua, ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Ketiga, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri.[86]

Ketika perkara perceraian diajukan oleh suami, maka hukum mengartikannya dengan sebutan cerai talak dan manakala pihak istri yang mengajukan perceraian maka hukum mengartikannya dengan sebutan cerai gugat. Karena antara suami dan istri sama dimata hukum dan mempunyai hak secara bebas untuk menjaga kelangsungan rumah tangga atau tidak dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum.[87]

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Fakhriadi Selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pekanbaru menyatakan bahwa kendala bagi mantan suami untuk menjalankan kewajibannya dalam pemberian nafkah iddah dan nafkah Anak adalah kurang kesadaran serta kurangnya pemahaman bahwa mantan suami wajib memberikan nafkah iddah kepada mantan istri, serta nafkah terhadap anaknya sendiri walaupun ia mengetahui hal tersebut dari

[86] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 67
[87] Arso, Sastroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*,Bulan Bintang, Jakarta, 2002, hlm. 55

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pengadilan Agama sudah dinyatakan dengan jelas.[88]

Kemudian wawancara penulis dengan Bapak Asfawi selaku Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menyatakan bahwa kendala bagi mantan suami untuk menjalankan kewajibannya dalam pemberian nafkah iddah dan nafkah Anak adalah banyak yang bisa menjadi kendala mantan suami dalam memberikan nafkah terhadap mantan istri dan anaknya, hal ini dikarenakan adanya faktor ekonomi karena mereka tidak mempunyai pekerjaan tetap, dimana mantan suami kebanyakan berpenghasilan kecil. Dengan penghasilan yang kecil apalagi tidak mempunyai pekerjaan tetap, dapatlah difahami jika mantan suami tidak pernah memberikan hak nafkah, Faktor Menikah kembali, Jika mantan suami menikah lagi, Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap keadaan finansialnya, dimana ia harus membiayai keluarganya yang baru. Keadaan ini akan sangat berpengaruh pula terhadap perhatian mantan suami dalam memberikan biaya nafkah. Karena mantan suami harus membiayai keluarganya yang baru, ia menjadi kurang atau tidak mampu lagi untuk memberikan biaya nafkah, faktor Psikologis dimana Mantan suami juga tidak mau memberikan biaya nafkah, karena berkaitan dengan aspek psikologis mantan suami yang menganggap bahwa biaya nafkah tersebut tidak lain adalah akan dipergunakan dan dimanfaatkan oleh mantan istrinya dan Faktor Mantan Isteri mampu untuk biayai nafkah dimana mantan isteri yang mempunyai penghasilan sendiri apabila bercerai, persoalan biaya nafkah tidak bagitu menjadi persoalan apalagi sejak dalam masa perkawinan pihak istrilah yang

[88] Wawancara penulis dengan Bapak Fakhriadi Selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, tanggal 05 februari 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

secara finansial lebih menghasilkan dibandingkan suaminya [89]

Untuk mengetahui tanggapan Pemohon dan Termohon tentang kendala bagi mantan suami untuk menjalankan kewajibannya dalam pemberian nafkah iddah dan nafkah Anak, dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.4
Tanggapan Pemohon dan Termohon Tentang Kendala Bagi Mantan Suami Untuk Menjalankan Kewajibannya Dalam Pemberian Nafkah Iddah Dan Nafkah Anak

No	Keterangan	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1.	Mantan suami telah menikah lagi	5	17%
2.	Mantan Suami Tidak Bekerja	25	83%
Jumlah		30	100%

Sumber: data olahan Penulis, 2021.

Berdasarkan keterangan tersebut, maka bisa dilihat tentang kendala bagi mantan suami untuk menjalankan kewajibannya dalam pemberian nafkah iddah dan nafkah Anak yaitu sebagian besar responden menyatakan Mantan Suami Tidak Bekerja yaitu sebanyak 25 orang atau 75% dan sebagian besar mantan suami menikah lagi sebanyak 5 orang atau 25%. Sehingga dari keterangan tersebut maka bisa dinyatakan mantan suami telah menikah lagi dan mempunyai keluarga yang baru dan membutuhkan biaya nafkah pula untuk membiayai keluarganya yang baru. Dalam hal ini, mantan suami sangat sulit untuk menyisihkan penghasilannya untuk memberikan biaya nafkah. Kemudian dikarenakan memang beliau tidak bekerja dan faktor menikah kembali sehingga tidak mampu untuk memberikan nafkah, serta dikarenakan

[89] Wawancara penulis dengan Bapak Asfawi selaku Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, tanggal 05 Februari 2021.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

memang tidak memiliki kesadaran akan kedudukannya sebagai seorang ayah.

Sehingga berdasarkan keterangan tersebut maka sudah dapat dikatakan putusan yang telah ditetapkan kepada masing-masing pihak dalam perkara perceraian terutama dalam memutuskan beban tanggung jawab dari seorang mantan suami terhadap nafkah yang wajib diberikannya tidaklah menjadi suatu ketetapan atau kepastian untuk dilaksanakan. Sehingga bisa dikatakan putusan tersebut belumlah memberikan suatu efektifitas hukum dalam pelaksanaannya.

Efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, efektivitas hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman dan paksaan pun merupakan unsur yang mutlak sehingga suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif kalau faktoryang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut agar mencapai tujuan yang dikehendaki. Perlu untuk diketahui juga bahwa efektivitas hukum adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, dan agar kaidah hukum atau sebuah peraturan berfungsi bahkan hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat. Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Keadaan tersebut dapat ditinjau atas dasar beberapa tolak ukur efektivitas.[90]

Bahkan apabila perceraian dilakukan di muka pengadilan, selain pengadilan akan memutuskan bahwa mantan suami berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada mantan isterinya, juga mantan isteri berhak menuntut ke depannya apabila mantan suami tersebut enggan membayar nafkah iddah kepada dirinya. Hal ini dapat dimaklumi, karena pemberian nafkah iddah merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, apakah karena alasan sudah menjadi kebiasaan atau karena tidak ada hubungan suami isteri lagi. Sebab dalam hukum negara sendiri juga sudah mewajibkannya terlebih lagi dalam hukum Islam, karena pemberian nafkah iddah juga bertujuan untuk menghibur mantan isteri supaya beban hidupnya tidak terlalu berat dan adanya penghargaan atas dirinya.

Menurut mayoritas ulama kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa alasan mengapa pihak suami diwajibkan menafkahi isterinya adalah karena adanya hubungan timbal balik antara

[90] Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV.Ramadja Karya, Bandung, 2008, hlm 80.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

suami isteri *(al-'alaqat al-zawjiyat)* artinya bahwa yang menjadi penyebab wajibnya nafkah karena akibat dari akad pernikahan yang sah yang masing-masing pihak kemudian terikat satu sama lain dengan hak dan kewajiban yang telah diatur oleh hukum agama. Selama masih ada hubungan kerja sama antara suami dengan isteri maka selama itu pula kewajiban untuk memberi nafkah dipikul dipundak suami.[91]

Oleh karena dianggap masih ada hubungan suami isteri, maka wanita yang sudah ditalak dengan *talak raj'i* masih wajib dinafkahi oleh suami. Adapun wanita yang yang ditalak ba'in tidak wajib dinafkahi karena sudah dianggap sama sekali putus hubungan suami isteri terlepas dari masalah apakah mantan isterinya sedang hamil atau tidak. Sedangkan menurut pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah isteri yang sedang hamil dan ditalak *ba'in* maka suami hanya berkewajiban memberikan tempat tinggal tanpa wajib memberikan nafkah kepadanya.

Selanjutnya, dalam hukum positif Indonesia bahwa akibat dari putusnya perkawinan mengakibatkan mantan suami wajib Memberi nafkah, maskan, dan kiswah, kepada mantan isteri selama dalam 'iddah, kecuali mantan isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Adapun yang dimaksud dengan nusyuz adalah yaitu ketika pihak isteri tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri untuk berbakti lahir dan batin kepada suami sesuai dengan hal-hal yang dibenarkan oleh hukum Islam. Hal itu berarti

[91] Satria Effendi, *Problema Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah)*, Kencana. Jakarta, 2004, hlm. 154.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang patut dijadikan tolak ukur dalam menentukan *nusyuz* atau tidaknya adalah berdasarkan pada fakta atas pembuktian yang sah dipersidangan terkait dengan sikap dan perilaku nusyuz selama keduanya menjalani rumah tangga bukan siapa yang mengajukan perceraian.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Fakhriadi Selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pekanbaru menyatakan bahwa upaya dalam mengatasi mantan suami tidak menjalankan kewajibannya dalam pemberian nafkah iddah dan nafkah Anak adalah jika berhubungan dengan nafkah iddah maka pihak pengadilan tidak akan menjatuhkan talak terhadap perceraiannya, sedangkan terhadap nafkah anak maka pihak mantan istri bisa melakukan eksekusi sesuai dengan ketentuan pengadilan.[92]

Kemudian wawancara penulis dengan Bapak Asfawi selaku Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menyatakan bahwa upaya dalam mengatasi mantan suami tidak menjalankan kewajibannya dalam pemberian nafkah iddah dan nafkah Anak adalah pada dasarnya seorang ayah sudah mengetahui akan kewajibannya terhadap anaknya, namun ketika kewajiban tersebut tidak dipenuhi maka pihak mantan istri bisa mengajukan eksekusi ke pengadilan[93]

Untuk mengetahui tanggapan Pemohon dan Termohon tentang upaya yang dilakukan dalam mengatasi mantan suami tidak menjalankan kewajibannya dalam pemberian nafkah iddah dan nafkah Anak, dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

[92] Wawancara penulis dengan Bapak Fakhriadi Selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, tanggal 05 Februari 2021
[93] Wawancara penulis dengan Bapak Asfawi selaku Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, tanggal 05 Februari 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel III.5
Tanggapan Pemohon dan Termohon Tentang Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Mantan Suami Tidak Menjalankan Kewajibannya Dalam Pemberian Nafkah Iddah dan Nafkah Anak

No	Keterangan	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1.	Ada	0	0
2.	Tidak ada	30	100%
Jumlah		30	100%

Sumber: Data Olahan Penulis, 2021.

Berdasarkan keterangan tersebut, maka bisa dilihat tentang upaya yang dilakukan dalam mengatasi mantan suami tidak menjalankan kewajibannya dalam pemberian nafkah iddah dan nafkah Anak yaitu sebagian besar responden menyatakan tidak ada yaitu sebanyak 30 orang atau 100%. Sehingga dari keterangan tersebut maka bisa dinyatakan dari salah satu pihak termohon menyatakan tidak bisa melakukan upaya apapun dikarenakan memang pihak mantan suami secara jelas tidak ada memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak anaknya.

Kedudukan anak-anak sangatlah lemah apabila dihadapkan dengan orang dewasa, sebagian mereka hanya pasrah dan menurut saja. Tekanan dan ketidakpedulian orang dewasa hanya dapat diterima dengan kondisi tidak mampu berbuat apa-apa. Atas dasar lemahnya posisi anak-anak tersebut, maka UU Perkawinan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang orang tuanya bercerai. Selain itu diatur juga masalah upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh anak yang orang tuanya bercerai dan tidak bertanggung jawab atau tidak mematuhi kewajiban yang diputuskan pengadilan yang berkaitan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dengan masalah pemberian hak-hak si anak. Upaya hukum yang dapat melindungi anak dari tindakan orang tua yang tidak bertanggung jawab sangat diperlukan dalam hal ini, jangan sampai anak-anak yang telah mengalami penderitaan akibat perceraian orang tua mereka juga dapat mendapat perlakuan yang semena-mena dengan tidak dipenuhinya hak-hak yang seharusnya dapat mereka peroleh.

Anak-anak yang orang tua mereka tidak melaksanakan kewajiban yang telah diputuskan oleh hakim, dapat menuntut hak-haknya dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Melaporkan kelalaian orang tua mereka kepada pihak keluarga yang dapat dipercaya dan dituakan, minta bantuan beliau secara kekeluargaan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Biasanya apabila orang tua mereka mendapat teguran dari pihak keluarga yang mereka segani dimungkinkan persoalan tersebut bisa diselesaikan.
2. Bisa juga dengan mendatangi pemuka agama yang dikenal dan dapat dipercaya. Mohon bantuan dari mereka untuk turut serta membantu menyelesaikan persoalan tersebut. Pada umumnya orang yang beragama akan patuh pada para pemuka agama sekaligus dijadikan orang tua (orang yang dituakan), pada umumnya akan sangat dipatuhi apa yang menjadi putusan pemuka agama. Posisi pemuka agama di sini sebagai mediator yang menengahi antara orang tua dan anak. Sanksi sosial yang menjadi efektif pada masyarakat yang masih memegang teguh sistem kekerabatan dan masih bersifat agamis.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perintah pemuka agama dianggap sesuatu yang sakral dan harus dipatuhi.

3. Apabila keluarga maupun pemuka agama tidak dapat juga mempengaruhi atau memperbaiki keadaan, maka upaya yang dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan ke pengadilan. Si anak melalui atau bersama dengan kuasa hukumnya atau walinya dapat meminta bantuan pengadilan. Bagi yang beragama Islam pengadilan yang dituju adalah pengadilan agama, dan bagi yang beragama selain Islam, maka pengajuan permohonannya ke pengadilan negeri. Berdasarkan alasan dan fakta yang ada, hakim dapat menetapkan permohonan yang diajukan si anak agar orang tuanya mau bertanggung jawab. Hakim melalui lembaga pengadilan dapat memaksa orang tua si anak melaksanakan ketentuan yang diperintahkan untuk bertanggung jawab dengan memenuhi hak-hak yang seharusnya di dapat oleh si anak. Jika alasan orang tua tidak dapat melaksanakan tanggung jawab mereka dikarenakan ketidakmampuan (tidak cakap dan/ atau tidak mampu secara finansial), maka hakim dapat mengangkat wali atau penetapan si anak menjadi tanggung jawab Negara.[94]

Seorang suami wajib hukumnya untuk memberi belanja istrinya karena adanya ikatan perkawinan yang sah oleh keduanya. Dengan kata lain pernikahan merupakan sebab yang mewajibkan suami memberi

[94] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Op.Cit, hlm.* 367

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

nafkah kepada istri. Karena pernikahan menjadikan seorang wanita terikat pada suami dan sebagai miliknya. Maka dari itu keduanya berhak menikmati milik pasangan begitu juga berlaku untuk anak-anaknya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian penulis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Penyelesaian Sengketa Nafkah Iddah Dan Nafkah Anak Pada Pengadilan Agama Pekanbaru adalah mantan suami memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan istri selama dalam masa menunggu, yang mana dalam masa menunggu tersebut istri tidak boleh menikah, dan sebagai ayah maka memiliki kewajiban kepada anaknya untuk memberikan pembiayaan pemeliharaan dan pendidikan anak hingga dewasa hingga mampu mempertanggungjawabkan hidupnya sendiri. Bila ayah tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk membiayai pemeliharaan anak, maka seorang (mantan) istri dapat melakukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama. Namun sebagaimana yang terjadi banyak mantan suami (ayah) tidak memenuhi kewajibannya, tetapi dikarenakan keterbatasan biaya eksekusi menyebabkan tidak ada satupun mantan istri (ibu) yang mengajukan permohonan eksekusi
2. Kendala Bagi Mantan Suami Untuk Menjalankan Kewajibannya Dalam Pemberian Nafkah Iddah dan Anak Setelah Putusnya Perkawinan Karena Perceraian adalah kurang kesadaran serta kurangnya pemahaman akan dalam memberikan nafkah iddah dan anak, tidak mempunyai pekerjaan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tetap dimana mantan suami kebanyakan berpenghasilan kecil, mantan suami menikah kembali, hal ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap keadaan finansialnya dimana ia harus membiayai keluarganya yang baru, dan adanya anggapan biaya nafkah yang akan diberikan tidak lain akan dipergunakan dan dimanfaatkan oleh mantan istrinya, serta adanya anggapan mantan istri mempunyai penghasilan sediri.

B. Saran

Sedangkan saran yang bisa penulis sampaikan yaitu antara lain:

1. Bagi pasangan suami isteri Meskipun telah terjadi perceraian hendaklah mengetahui tanggung jawab dari masing-masing pihak terkait dengan nafkah anak, meskipun telah terjadi perceraian hendaklah mengetahui tanggung jawab dari masing-masing pihak terkait dengan nafkah anak
2. Kepada Pemohon (mantan suami), agar melaksanakan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada anak sebagai mana amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru secara sukarela.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat,* Prenanda Media, Jakarta Timur, 2003.

Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1999

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,* Prenada Media, Yogyakarta, 2018

Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam,* PT Rineka Cipta, Jakarta, 2012

Abdurrahman, *Usaha-Usaha Penyempurnaan Pelaksanaan UUP,* Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Adib Bahari, *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono Gini dan Hak Asuh Anak,* Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia,* Rajawali Pers, Depok, 2017

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al Munawwir Arab-Indonesia,* Pustaka Progresif, Surabaya, 2002

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,* Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999

_____, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,* Prenada Media, Jakarta, 2017

Ali Yusuf al-Subki, *Fikih Keluarga,* Amzah, Jakarta, 2012

Arso, Sastroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia,* Bulan Bintang, Jakarta, 2002

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai dengan KHI,* Kencana, Jakarta, 2004

Budi Susilo, *Gugatan Cerai,*Pustaka Yustisia, Jakarta, 2007

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006

Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat Di Indonesia (Sistem kekerabatan, Perkawinan dan Pewarisan Menurut Hukum Adat,*: LaksBang Presindo, Yogyakarta, 2015

H.M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*,Gaung Persada Press, Jakarta, 2007

Ibnu Mas"ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, Pustaka setia, Bandung, 2007

Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021

J. Prins, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002

Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan Dan Hukum Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011

Maswandi, *Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2017

Moh. Afifi, Abdul Aziz,, *Fiqih Imam Syafi'i 3,* PT. Niaga Swadaya, Jakarta, 2010

Muchtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat*, Timun Mas, Jakarta, 2000

R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2011

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*,Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung , 2000

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Satria Effendi, *Problema Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah)* Kencana, Jakarta, 2004

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munkahat*, CV Pustaka Setia, Bandung, 1999

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2002

Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV.Ramadja Karya, Bandung, 2008

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2016

Sulaiman Rasyid, *fiqih Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2003

T. Jafizham, *Persentuhan Hukum Di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*, Mestika, Jakarta, 2006

Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia Dan Belanda*, Mandar Maju, Bandung, 2002

Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 2000

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Jurnal/Skripsi/Tesis

Anton Afrizal Candra, *Tinjauan Terhadap Perkawinan Di Bawah Tangan menurut Hukum Islam,* Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau ISBN 978-979-3793-71-9

Jamiliya Susanti, *Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Di Pengadilan Agama Sumenep-Madura,* Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014

Meita Djohan OE, *Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA TnK)* , Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung Volume 11 Nomor 1 Januari 2016.

Maswandi, *Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2017)

Mansari, *Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Suatu Kajian Empiris Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*, Jurnal Petita, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda AcehVolume 1 Nomor 1, April 2016.

Muhammad Ridwan, *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut'ah,* Jurnal USM Law Review Vol 1 No 2 Tahun 2018.

Nandang Ihwanudin, *Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama,* Jurnal Aqliya Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Siliwangi Bandung, Vol 1 No 1 Juni 2016.

Diana Yulita Sari, *Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak" (Studi Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006),* Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Moh. Sitta Fathurrohman, *Hak Asuh Atas Anak Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Setelah Terjadi Perceraian Antara Suami Dan Isteri*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.

Lulus Utisna Sari, *Pemberian Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Terhadap Orangtua Laki-Laki (Ayah) Di Pengadilan*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Agama Semarang (Studi Putusan PA Semarang NO: 0751/pdt.G/2012/PA.sm)", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013

Ani Sri Duriyati, *Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri Dan Anak Dalam Praktek Di Pengadilan Agama Semarang,* Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2009.

D. Kamus Hukum

Depdikbud. (1996). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

M. Marwan, (2009). *Kamus Hukum*, Realty Publiser, Surabaya.

Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :